

## **BAB I PENDAHULUAN UMUM**

### **1.1. Latar Belakang**

Pertumbuhan penduduk Kasto (2002) menjelaskan pertumbuhan penduduk dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu pertumbuhan alami yang terjadi di dalam wilayah kota serta penambahan penduduk akibat arus urbanisasi dari desa ke kota. Peningkatan jumlah penduduk tersebut berimplikasi langsung terhadap perluasan kawasan permukiman perkotaan. Kota Makassar merupakan salah satu kota metropolitan di Indonesia dan menempati posisi kedua terbesar di luar Pulau Jawa setelah Kota Medan. Dengan luas wilayah sekitar 199,26 km<sup>2</sup> dan jumlah penduduk yang hampir mencapai 1,45 juta jiwa, Kota Makassar menunjukkan tingkat kepadatan penduduk yang relatif tinggi. Sementara itu, standar ideal kepadatan penduduk adalah 500 jiwa per km<sup>2</sup> atau setara dengan ketersediaan ruang gerak sebesar 5 m<sup>2</sup> per jiwa dalam bangunan. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2023, jumlah penduduk mengalami peningkatan sebesar 10,11% yang dipengaruhi oleh tingginya angka urbanisasi dan kelahiran. Kondisi ini perlu diantisipasi melalui pengendalian dan penataan pola pertumbuhan yang merata dan berkelanjutan, sejalan dengan amanat Sustainable Development Goals (SDGs) sebagai komitmen global dan nasional dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu tujuan SDGs adalah untuk mewujudkan kota dan permukiman yang inklusif, aman, dan berkelanjutan. Pembangunan merupakan proses perubahan sosial yang melibatkan partisipasi masyarakat untuk meningkatkan kesejahteraan dan kualitas hidup. Permasalahan permukiman terus berkembang seiring dengan pertumbuhan penduduk. Pertumbuhan penduduk yang pesat mendorong perluasan kawasan permukiman dan meningkatkan kebutuhan akan lahan. Namun, kemampuan kota dalam menyediakan lahan, infrastruktur, dan permukiman yang layak sering kali tidak sebanding dengan laju pertumbuhan tersebut, sehingga memicu munculnya kawasan permukiman kumuh di wilayah perkotaan (Patrisia, 2017).

Para ahli dan praktisi pembangunan perkotaan menilai bahwa belum optimalnya pembangunan permukiman di kota-kota besar di Indonesia dipengaruhi oleh tingginya urbanisasi penduduk berpenghasilan rendah, keterbatasan lahan perkotaan, serta

ketidaktepatan program pembangunan kota. Kondisi tersebut mendorong munculnya permukiman padat dengan fasilitas dasar yang tidak layak (Ir. Triatno Yudo Harjoko, 2010). Selain itu, permasalahan permukiman kumuh di perkotaan juga dipicu oleh paradigma pembangunan yang berorientasi pada proyek serta belum meratanya pemerataan pembangunan (Prasojo, 2010).

Dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) periode 2020–2024, Pemerintah Indonesia menargetkan pemenuhan akses sanitasi layak secara menyeluruh, penghapusan kawasan permukiman kumuh, serta peningkatan akses terhadap air minum yang aman. Sejalan dengan upaya tersebut, pemerintah juga menetapkan sasaran penyediaan hunian layak melalui program penanganan permukiman kumuh, dengan target capaian rumah layak huni sebesar 70% selama periode perencanaan 2020–2024.

Permukiman kumuh adalah “permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat”. Permukiman kumuh membentuk lingkungan yang tidak layak dan berdampak negatif terhadap kualitas kehidupan, baik dari aspek fisik maupun nonfisik, serta mengganggu estetika perkotaan. Penanganan dan pengelolaan permukiman kumuh telah diatur dalam peraturan perundang-undangan, khususnya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Penanganan persoalan permukiman dapat diarahkan melalui penerapan konsep *smart city* dan *sustainable urban neighborhood* sebagai landasan dalam pengembangan kawasan hunian yang sehat, layak, dan berkelanjutan. Penataan permukiman kumuh secara terpadu merupakan bagian dari agenda prioritas pemerintah dalam mendukung pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (SDGs), khususnya terkait pengentasan kemiskinan, pengurangan kesenjangan, serta pengembangan kota dan komunitas yang berkelanjutan. Dalam mendukung kebijakan tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) memfokuskan peningkatan kualitas permukiman layak huni pada sejumlah kota dan kabupaten prioritas yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman. Implementasi penataan permukiman kumuh terintegrasi memerlukan peran koordinatif yang kuat antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, serta aktor non-negara. Koordinasi lintas

tingkat pemerintahan menjadi kunci untuk menghindari tumpang tindih kewenangan, mengurangi dampak negatif fragmentasi kelembagaan, dan meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan permukiman (Ndraha, 2013).

Permukiman kumuh terbentuk sebagai akibat dari laju pertumbuhan penduduk, tingginya tingkat kemiskinan, serta lemahnya peran pemerintah dalam mengendalikan perkembangan wilayah dan menyediakan layanan perkotaan yang memadai (Cahya & Juanda, 2012). Selain itu, keberadaan permukiman kumuh di kawasan perkotaan juga mencerminkan lemahnya tata kelola pemerintahan, karena menimbulkan citra negatif terkait ketidakmampuan pemerintah dalam mengatur pelayanan dasar serta menjamin kualitas kehidupan dan penghidupan masyarakat (Robichin, et.al. 2019). Kota Makassar merupakan ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan menjadi pusat konsentrasi penduduk, dengan sekitar 15 persen dari total penduduk Sulawesi Selatan yang berjumlah 9,4 juta jiwa bermukim di wilayah ini. Kepadatan penduduk tertinggi tercatat di Kecamatan Tamalate dengan jumlah penduduk mencapai 188.432 jiwa. Dengan luas wilayah sekitar 175,8 km<sup>2</sup>, Kota Makassar berkembang sebagai salah satu wilayah investasi yang paling potensial, sehingga mendorong pesatnya perkembangan sektor infrastruktur, perdagangan, industri, pendidikan, dan layanan kesehatan dibandingkan kota-kota lain di kawasan Indonesia Timur. Kondisi tersebut berdampak pada peningkatan jumlah penduduk dari tahun ke tahun. Pada tahun 2021, jumlah penduduk Kota Makassar tercatat sebanyak 1.427.619 jiwa, meningkat menjadi 1.432.189 jiwa pada tahun 2022 atau bertambah sebesar 0,32 persen, dan kembali mengalami kenaikan pada tahun 2023 menjadi 1.474.393 jiwa atau meningkat sebesar 2,94 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Menyikapi dinamika tersebut, Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan melakukan upaya revitalisasi kawasan permukiman kumuh yang tertuang dalam Peraturan Gubernur Sulawesi Selatan Nomor 13 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2024–2026.

Kota Makassar mengalami perubahan pola pemanfaatan lahan sebagai dampak dari pertumbuhan penduduk dan meningkatnya aktivitas sosial ekonomi yang bersifat strategis. Kota ini dihuni oleh masyarakat dengan latar belakang etnis yang beragam, dengan laju pertumbuhan penduduk rata-rata mencapai 1,18 persen per tahun. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa dalam kurun waktu sepuluh tahun mendatang akan terjadi peningkatan kebutuhan akan perumahan

dan kawasan permukiman yang menuntut ketersediaan lahan dalam skala besar dan pemanfaatan yang semakin intensif.

Pemerintah Kota Makassar secara berkelanjutan berperan aktif dalam upaya penanganan lingkungan permukiman kumuh guna mewujudkan kawasan hunian yang layak serta menekan keberadaan permukiman tidak layak huni. Upaya tersebut sejalan dengan kebijakan dan program pemerintah pusat dalam penanganan kawasan kumuh, termasuk komitmen menuju target bebas kumuh. Program peningkatan kualitas permukiman dilaksanakan secara menyeluruh hingga pada tingkat paling bawah, yaitu lingkungan kelurahan, termasuk Kelurahan Tallo dan Kelurahan Tanjung Merdeka, sebagaimana kelurahan lainnya di Kota Makassar. Berbagai kegiatan penataan dan peningkatan kualitas permukiman kumuh telah dilaksanakan dengan dukungan pendanaan dari APBN maupun APBD Kota Makassar. Program-program yang telah direalisasikan meliputi SLBM, USRI, PAMSIMAS, PNPM-MP, P2KP, NUSSP, PLPBK, serta program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang telah berjalan sejak tahun 2009 hingga saat ini. Selain itu, visi dan misi pembangunan Kota Makassar yang tertuang dalam RPJMD juga mendorong lahirnya berbagai kegiatan aplikatif sebagai bentuk dukungan terhadap peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, permukiman kumuh didefinisikan sebagai kawasan hunian yang tidak layak huni akibat ketidakteraturan tata bangunan, tingginya kepadatan bangunan, serta kondisi bangunan, sarana, dan prasarana yang tidak memenuhi standar kelayakan. Di Kota Makassar, luas kawasan permukiman kumuh pada tahun 2014 tercatat mencapai sekitar 740,10 hektare yang tersebar pada 103 kelurahan, sebagaimana ditetapkan dalam Surat Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 050.05/1341/Kep/05/2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh. Kawasan tersebut terdiri atas 36 kelurahan dengan kategori kumuh berat, 51 kelurahan kumuh sedang, dan 17 kelurahan kumuh ringan. Secara keseluruhan, sekitar 432.115 jiwa atau 131.299 kepala keluarga dari total penduduk Kota Makassar bermukim di kawasan permukiman kumuh. Hingga akhir tahun 2017, berbagai kebijakan dan program penanganan telah dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Makassar melalui kolaborasi dengan pemerintah pusat, sektor swasta, serta pemangku kepentingan lainnya. Karakteristik kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar antara lain ditandai oleh keberadaan bangunan hunian ilegal dan tidak tertata, keterbatasan fasilitas umum dan prasarana lingkungan yang belum direncanakan

secara memadai untuk mendukung pertumbuhan kawasan, keterbatasan akses air bersih terutama di wilayah pesisir, sistem drainase lingkungan yang tidak terintegrasi dengan badan air, serta pengelolaan dan ketersediaan sarana persampahan yang belum memadai.

Berdasarkan hasil kajian terhadap Dokumen SIAP (*Slum Improvement Action Plan*) Kota Makassar tahun 2017, terdapat tiga aspek kekumuhan yang paling dominan, yaitu belum optimalnya pengelolaan sarana dan prasarana persampahan sebesar 45,36 persen, kondisi drainase lingkungan yang tidak memenuhi standar teknis sebesar 41,09 persen, serta kualitas bangunan hunian yang belum memenuhi standar kelayakan sebesar 40,08 persen. Ketiga aspek tersebut umumnya ditemukan pada kawasan dengan tipologi kumuh dataran rendah, pusat kota, bantaran kanal, tepi sungai, sempadan pantai, hingga bangunan yang berdiri di atas badan sungai. Oleh karena itu, diperlukan kajian mendalam mengenai karakteristik permukiman kumuh di Kota Makassar, khususnya dari aspek bangunan hunian, mengingat hunian merupakan salah satu kebutuhan dasar utama bagi manusia.

Kelurahan Tallo merupakan salah satu wilayah di Kota Makassar yang memiliki cakupan kawasan permukiman kumuh cukup luas. Berdasarkan hasil penilaian dan identifikasi tingkat kekumuhan, kawasan Kelurahan Tallo diklasifikasikan sebagai permukiman kumuh berat (Dokumen Identifikasi Kawasan Kumuh Kota Makassar, 2015). Kondisi tersebut mendorong dilaksanakannya berbagai intervensi penanganan permukiman kumuh melalui program peremajaan lingkungan yang difokuskan pada peningkatan kualitas lingkungan permukiman.

Kelurahan Tallo termasuk dalam wilayah yang ditetapkan sebagai kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar berdasarkan Keputusan Wali Kota Makassar Nomor 050.05/1341/Kep/05/2014. Kondisi tersebut dipengaruhi oleh beragam faktor yang mendorong terbentuk dan berkembangnya lingkungan hunian tidak layak di kawasan tersebut. Upaya peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Tallo dilakukan melalui pendekatan partisipatif dengan melibatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam mendukung program penataan lingkungan yang diinisiasi oleh pemerintah. Pendekatan ini selaras dengan berbagai regulasi dan kebijakan nasional maupun daerah, antara lain kebijakan penataan permukiman, peningkatan kualitas perumahan dan kawasan kumuh, serta pengembangan dan

pemeliharaan jaringan jalan perkotaan sebagaimana tercantum dalam rencana tata ruang wilayah Kota Makassar. Selain aspek fisik, strategi penanganan juga diarahkan pada penguatan potensi sosial dan ekonomi masyarakat melalui program pemberdayaan, seperti RP2KPKP dan KOTAKU, serta kebijakan penanganan kawasan kumuh tingkat kota.

Penelitian terkait penanganan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo mengkaji beberapa variabel utama, meliputi sistem drainase, penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, dan persampahan. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan uji chi-square, analisis faktor internal dan eksternal (IFE–EFE), matriks Internal–Eksternal (IE), serta analisis SWOT. Hasil analisis menunjukkan bahwa aspek ketersediaan dan pemenuhan kebutuhan air minum memiliki pengaruh paling signifikan terhadap munculnya kekumuhan, sementara pengelolaan air limbah dan persampahan memberikan pengaruh pada tingkat sedang terhadap kondisi permukiman kumuh (St. Nurhaliza Marjuni, 2021).

Penanganan lingkungan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo dilaksanakan melalui program peremajaan kawasan yang menitikberatkan pada berbagai bentuk intervensi fisik, termasuk pembangunan dan peningkatan prasarana lingkungan permukiman. Secara perencanaan, konsep penanganan kawasan tersebut telah disusun dengan cukup baik, namun dalam pelaksanaannya masih dihadapkan pada sejumlah tantangan, terutama terkait ketersediaan sumber daya manusia dan dukungan pendanaan. Secara umum, pelaksanaan kegiatan fisik mampu memberikan perubahan visual dan meningkatkan kualitas fisik kawasan, sehingga berkontribusi terhadap penurunan tingkat kekumuhan. Namun demikian, efektivitas jangka panjang dari intervensi fisik tersebut masih menjadi pertanyaan, khususnya terkait keberlanjutan hasil pembangunan. Selain itu, perlu dikaji lebih lanjut sejauh mana peningkatan kualitas fisik kawasan tersebut berdampak positif terhadap kondisi sosial dan ekonomi masyarakat setempat, mengingat permasalahan permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik lingkungan, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat.

Kecamatan Tamalate merupakan salah satu dari 14 Kecamatan di Kota Makassar yang terdiri dari 10 Kelurahan yaitu Kelurahan Barombong, Tanjung Merdeka, Maccini Sombala, Balang Baru, Jongaya, Bungaya, Pa'baeng- baeng, Mannuruki, Parang Tambung dan Mangasa. Adapun kelurahan yang termasuk wilayah kumuh berat yang

ada di Kecamatan Tamalate yaitu kelurahan Mangasa, Parang Tambung, Tanjung Merdeka, Barombong dan Maccini Sombala.

Hasil penelitian Arwiny Ramadhani (2019) menunjukkan adanya perbedaan antara kondisi di lapangan dan informasi yang disampaikan melalui media, khususnya pemberitaan [Makassarmetro.com](http://Makassarmetro.com) (2017) yang menyatakan bahwa capaian penanganan dan pengurangan kawasan kumuh telah mencapai 60 persen. Temuan di lapangan mengungkapkan bahwa Kecamatan Tamalate, yang dikategorikan sebagai kawasan kumuh berat, masih menghadapi berbagai permasalahan lingkungan, seperti kondisi jalan yang rusak, penumpukan sampah, serta sistem drainase yang tidak berfungsi dengan baik.

Kawasan permukiman di sekitar Kanal Jongaya, khususnya di Kelurahan Bontorannu, menunjukkan penurunan kualitas dari aspek ekonomi, lingkungan, dan sosial. Perkembangan permukiman yang tidak terkendali mendorong meningkatnya kepadatan bangunan yang tidak tertata, baik dari segi koefisien kepadatan, pola tata bangunan, maupun kondisi kebersihan lingkungan. Situasi tersebut berdampak pada penurunan kualitas lingkungan hunian dan berpotensi meningkatkan kerawanan sosial, termasuk risiko terjadinya tindak kriminalitas.

Kawasan permukiman perkotaan di sepanjang bantaran Kanal Jongaya menjadi salah satu sumber pencemaran lingkungan, yang ditandai oleh tingginya penumpukan sampah dan menurunnya kualitas air. Kondisi tersebut turut memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan Pantai Losari sebagai salah satu ikon Kota Makassar. Secara khusus, lingkungan bantaran Kanal Jongaya di Kelurahan Bontorannu mengalami penurunan kualitas lingkungan, yang ditunjukkan oleh permasalahan pada kondisi kanal serta kawasan permukiman yang belum memenuhi standar kelayakan hunian.

Kawasan Permukiman Bontorannu merupakan salah satu wilayah yang diidentifikasi sebagai kawasan permukiman kumuh di Kecamatan Mariso, Kota Makassar. Wilayah ini memiliki luas sekitar 2,968 hektare yang terbagi ke dalam 10 rukun warga (RW). Secara geografis, Kelurahan Bontorannu terletak di kawasan pesisir yang berbatasan dengan Selat Makassar, dengan posisi astronomis pada koordinat 5°09'47,90" Lintang Selatan dan 119°24'24,00" Bujur Timur. Berdasarkan data tahun 2023, jumlah penduduk Kelurahan Bontorannu tercatat sebanyak 6.187 jiwa, yang terdiri dari 3.210 penduduk laki-laki dan 2.977 penduduk perempuan. Berdasarkan Surat Keputusan Wali

Kota Makassar Nomor 050.05/1341/Kep/05/2014 tentang Penetapan Kawasan Kumuh, Kelurahan Bontorannu dikategorikan sebagai kawasan dengan tingkat kekumuhan ringan.

Dari perspektif sosiologis, kemunculan permukiman kumuh erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan, baik di wilayah perdesaan maupun perkotaan. Kemiskinan di perdesaan mendorong sebagian penduduk untuk melakukan urbanisasi, namun keterbatasan keterampilan dan rendahnya tingkat pendidikan menyebabkan banyak pendatang tidak terserap dalam lapangan kerja di kota. Kondisi ini justru memperluas kantong-kantong kemiskinan baru di wilayah perkotaan. Sementara itu, kemiskinan yang dialami masyarakat perkotaan mengakibatkan keterbatasan kemampuan dalam memperoleh hunian yang layak dan lingkungan yang sehat, sehingga sebagian penduduk terpaksa tinggal di kawasan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan dan memiliki berbagai risiko sosial maupun lingkungan.

Menurut John Friedman, kemiskinan dipahami sebagai kondisi ketika individu tidak memiliki kemampuan untuk mengakses dan menguasai sumber-sumber kekuatan sosial. Kekuatan sosial tersebut mencakup kepemilikan aset produktif, akses terhadap sumber keuangan, keterlibatan dalam organisasi sosial dan politik, serta keberadaan jaringan sosial (Suyanto, 2001). Dalam konteks Kota Makassar, terbentuknya kawasan permukiman kumuh berkaitan erat dengan keterbatasan masyarakat penghuninya dalam memperoleh dan memanfaatkan berbagai basis kekuatan sosial tersebut.

Keterbatasan akses terhadap modal produktif berupa aset terjadi karena masyarakat berpenghasilan rendah di Kota Makassar tidak memiliki kemampuan finansial untuk memperoleh hunian yang layak di lingkungan yang sehat. Kondisi tersebut mendorong mereka untuk menetap di kawasan permukiman padat, lingkungan yang tidak sehat, atau bahkan membentuk permukiman informal. Dari sisi sumber keuangan, eksklusivitas pasar kerja di Kota Makassar turut mempersempit peluang masyarakat miskin untuk memperoleh pekerjaan yang layak. Rendahnya tingkat pendidikan dan keterampilan menyebabkan sebagian masyarakat terpinggirkan dari akses pekerjaan formal, yang berdampak langsung pada rendahnya pendapatan dan kualitas kesejahteraan hidup. Selain itu, keterbatasan akses terhadap organisasi sosial dan politik mencerminkan lemahnya posisi tawar masyarakat yang bermukim di kawasan kumuh, sehingga mereka kesulitan memperoleh akses pembiayaan formal maupun menyuarakan kepentingan melalui jalur politik. Kondisi tersebut memperparah

kerentanan ekonomi yang mereka alami. Lemahnya jaringan sosial juga menjadi faktor penghambat dalam memperoleh pekerjaan atau meningkatkan keterampilan, sehingga sebagian besar masyarakat hanya mengandalkan pekerjaan informal dengan tingkat pendapatan yang rendah.

Dari beberapa hal terkait fenomena yang melatarbelakangi timbulnya permukiman kumuh di Kota Makassar, maka peneliti ingin lebih dalam mengkaji bagaimana Pengembangan Kawasan Permukiman Berkelanjutan Di Kawasan Kumuh Kota Makassar.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas beberapa permasalahan yang terjadi dapat dirumuskan dalam penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana kondisi eksisting penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka, dan Kelurahan Bontorannu?
2. Bagaimana pola penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan tingkat kekumuhan dan pendekatan *Co-Housing* di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu?
3. Bagaimana strategi pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan di wilayah kumuh Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu?

## **1.3. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini dirumuskan untuk memberikan arah yang jelas dalam menjawab permasalahan yang telah diuraikan sebelumnya. Tujuan tersebut antara lain:

1. Mengeksplorasi secara mendalam kondisi eksisting penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka, dan Kelurahan Bontorannu.
2. Menganalisis pola penanganan kawasan permukiman kumuh berdasarkan tingkat kekumuhan dan pendekatan *Co-Housing* di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu.
3. Merumuskan strategi pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan berbasis karakteristik tipologi kekumuhan yang dapat direplikasi pada kawasan serupa.

## **1.4. Kegunaan Penelitian**

Adapun manfaat penelitian yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis:

Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan referensi dalam menganalisis dan menilai penanganan kawasan permukiman kumuh menjadi kawasan permukiman yang lebih sehat dan berkelanjutan berbasis partisipasi masyarakat di Kota Makassar.

2. Manfaat Praktis :

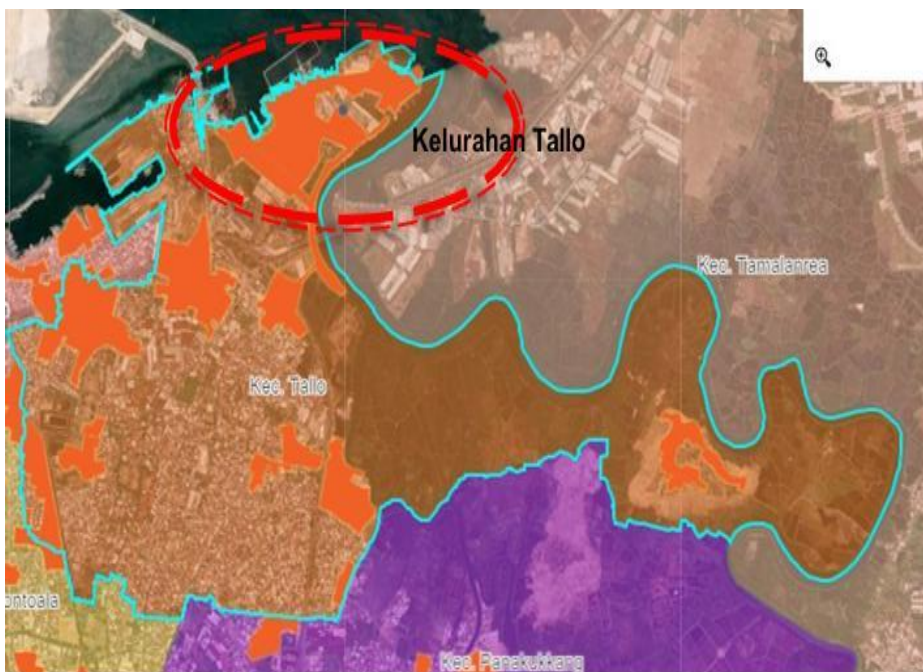
Bagi instansi yang berkaitan dengan penelitian ini sebaiknya dijadikan sebagai bahan pertimbangan dan masukan bagi Pemerintah di Wilayah Kecamatan Tamalate, Kecamatan Mariso maupun Kecamatan Tallo dalam rangka penanganan kawasan permukiman kumuh di Kota Makassar, termasuk kebijakan di tingkat pemerintah kota, pemerintah provinsi, dan pusat.

### 1.5. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini adalah:

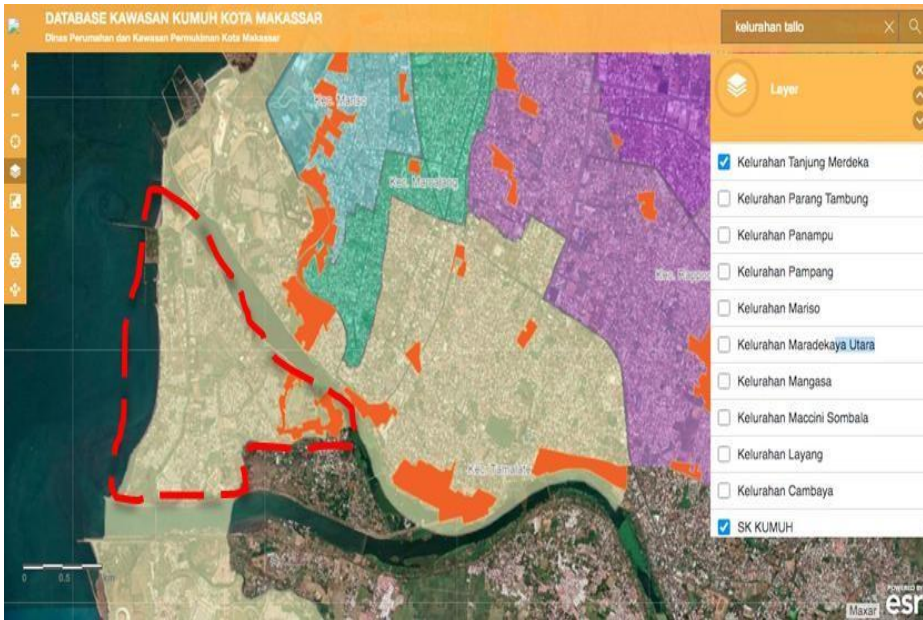
1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini berfokus pada tiga kelurahan di Kota Makassar yang masuk dalam kategori wilayah kumuh berdasarkan SK Walikota Makassar tentang Penetapan Kawasan Kumuh No: 050.05/1341/Kep/05/2014 yaitu Kelurahan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka dan Kelurahan Bontorannu.



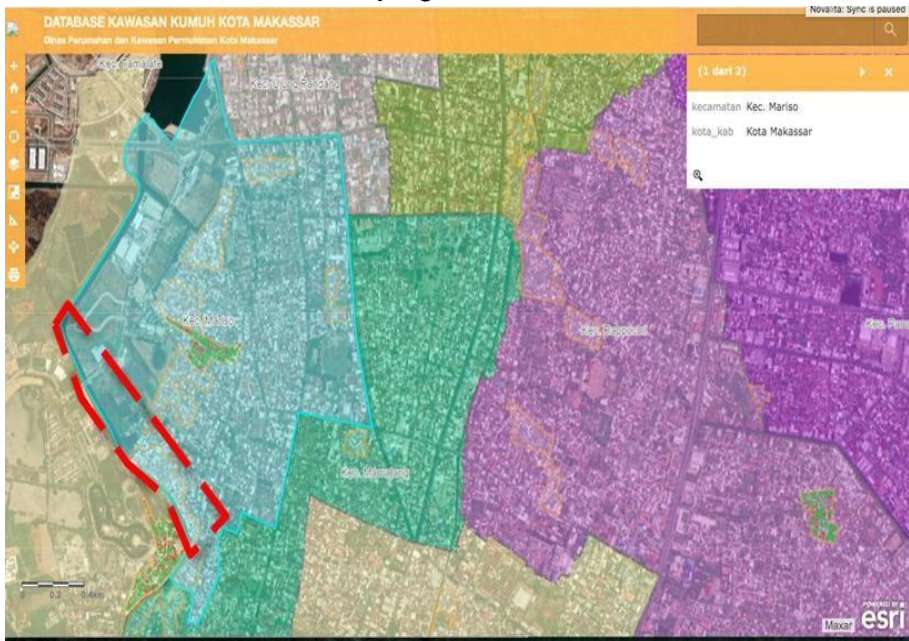
Sumber : Database Kawasan Kumuh Kota Makassar, Maxar Esri.com, 2024

Gambar 1. 1 Lokasi Penelitian di Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo



Sumber : Database Kawasan Kumuh Kota Makassar, Maxar Esri.com, 2024

Gambar 1. 2 Lokasi Penelitian di Permukiman Kumuh Kelurahan Tanjung Merdeka



Sumber : Database Kawasan Kumuh Kota Makassar, Maxar Esri.com, 2024

Gambar 1. 3 Lokasi Penelitian di Permukiman Kumuh

di Kelurahan Bontorannu

## 2. Variabel Penelitian

Variabel dalam penelitian ini yaitu:

- a. Pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan yang berfokus pada aspek kualitas lingkungan permukiman, ketersediaan infrastruktur dasar, keterlibatan masyarakat, aspek sosial, ekonomi, dan ekologis permukiman.
- b. Kondisi kawasan kumuh yang mencakup, bangunan gedung, jalan lingkungan, akses dan penyediaan air minum, pengelolaan air limbah, kondisi drainase, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran.

### 1.6. Kebaruan Penelitian

Penelitian ini memiliki kebaruan dalam pengintegrasian pendekatan pembangunan berkelanjutan dan partisipasi masyarakat dalam penanganan kawasan kumuh di Kota Makassar, yang belum banyak dijelajahi dalam studi-studi sebelumnya. Berbeda dengan penelitian terdahulu yang cenderung memisahkan isu keberlanjutan dan kekumuhan, penelitian ini secara holistik mengkaji kondisi fisik, sosial, ekonomi, dan lingkungan dari tiga kelurahan yang memiliki karakteristik kawasan kumuh yang berbeda, yaitu Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu.

Selain itu, penelitian ini mengembangkan strategi pengembangan yang lebih inklusif dengan melibatkan model Co-Housing, yang menekankan pada aspek sosial dan ekonomi masyarakat di kawasan kumuh. Pendekatan ini memperkaya perspektif dalam merumuskan solusi yang tidak hanya berfokus pada infrastruktur, tetapi juga pada pemberdayaan masyarakat dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan. Melalui analisis strategis berbasis data lokal seperti SWOT, IFE-EFE Matrix, dan Matriks Kelayakan Strategi, penelitian ini menghasilkan rekomendasi yang kontekstual dan aplikatif, memperkuat relevansi ilmiah serta praktis dalam mendukung perencanaan kawasan permukiman yang inklusif dan berkelanjutan.

Tabel 1. 1 Daftar Karya Ilmiah yang Berkaitan dengan Topik Penelitian

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
1	St. Nurhalizah Mardjuni dan Syafri	Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatn Tallo Kota Makassar	Journal of Urban Planning Studies, 24 April 2021	Metode analisis chi-square, analisis faktor-faktor internal dan eksternal (IFE- EFE), matriks IE, serta analisis SWOT	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa sumber air minum dan kebutuhan air minum berpengaruh kuat terhadap penyebab kekumuhan, sedangkan air limbah dan persampahan berpengaruh sedang terhadap penyebab kekumuhan. Adapun strategi peningkatan kualitas permukiman kumuh di Kelurahan Tallo Kota Makassar ialah memanfaatkan masyarakat yang mendukung program pemerintah terkait kegiatan peningkatan kualitas lingkungan permukimannya dengan adanya SK MENTRI NO 534/KTPS/M/200 Tentang penataan permukiman, memanfaatkan kesadaran masyarakat

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
2	Misna Utri Wiharti	Analisis Perhitungan Tingkat Kekumuhan Permukiman di Kabupaten Banjar	Jurnal Teknologi Berkelanjutan (Sustainable Technology Journal) Vol. 10 No. 02 (tahun) pp. 88 - 96	Identifikasi dilakukan dengan melakukan analisis tingkat kekumuhan berdasarkan Peraturan Menteri PUPR Tahun 2016. Pelaksanaan dilakukan berdasarkan dari hasil data survei, dan analisa perhitungan penilaian skoring tingkat kekumuhan.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Dari hasil analisis diketahui bahwa klasifikasi tingkat kekumuhan di Desa Simpang Warga Dalam, Kecamatan Aluh-Aluh termasuk dalam kategori Kumuh Berat, dan Desa Muara Halayung, Kecamatan Beruntung Baru termasuk dalam kategori Kumuh Ringan.
3	Restu Erlangga dan RB Moh Dimas Badarus	Strategi Penanganan Slum Area Dengan Menggunakan Metode AHP Berbasis SIG, Studi Kasus Di Kampung Muharto, Kecamatan	Jurnal SEMSINA 2023	Penelitian ini menggunakan metode penelitian yang dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan data primer yang dikumpulkan oleh peneliti. Data primer yang digunakan adalah	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta	Dengan melihat hasil penilaian AHP Kampung Muharto, maka untuk menangani kawasan permukiman kumuh, terdapat beberapa cara yang dapat diterapkan pada kawasan tersebut adalah dengan perbaikan kawasan permukiman

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Kotalama, Kota Malang		hasil observasi langsung peneliti ke lokasi penelitian dan hasilnya dianalisa menggunakan GIS dan AHP	peran pemerintah daerah	
4	Bayu Afirianto	Arahan Penataan Lingkungan Permukiman Kumuh Kecamatan Kenjeran dengan pendekatan Eco-Settlements	Jurnal Of Civil and Planning Engineering, 201-RP 141501	Penelitian ini bertujuan untuk menentukan arahan yang tepat dalam penataan lingkungan permukiman kumuh dengan pendekatan Eco-Settlements yaitu konsep tempat bermukim yang ekologis berkembang dari konsep pembangunan berkelanjutan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah. Dalam penelitian disertasi saya juga menggunakan pendekatan Co-Housing yaitu satu atau lebih bangunan	Output yang dihasilkan pada penelitian ini berupa deskripsi arahan dari setiap faktor-faktor yang mempengaruhi permukiman kumuh didasarkan pada kebijakan, base theory, dan penelitian yang telah dilakukan. Arahan tersebut yaitu penambahan dan peningkatan kualitas prasarana dan sarana permukiman, peningkatan daya dukung lingkungan dan sumber daya masyarakat, pemberdayaan ekonomi masyarakat yang ramah lingkungan, serta peningkatan kualitas

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
					yang terdiri dari beberapa rumah serta setiap rumah dihuni oleh sebuah keluarga dimana satu dengan lainnya akan memunculkan sense of belonging	institusi dan kesadaran akan kebijaksanaan yang ada terhadap pengelolaan permukiman kumuh.
5	Risnawati K	Analisis Konsep Pencegahan Permukiman Kumuh di Kabupaten Soppeng	Jurnal Al-Hadarah Al-Islamiah Oktober 2022	Penelitian ini menggunakan metode analisis yang mencakup metode kualitatif dan kuantitatif.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Strategi pencegahan dan peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh di Kabupaten Soppeng dirumuskan dengan melihat arah kebijakan pembangunan dan penataan ruang Kabupaten Soppeng terkait dengan penanganan kawasan permukiman kumuh, kondisi eksisting kawasan permukiman kumuh dan isu strategis kawasan.
6	Harin Tiawon, Titiani Widati, Amiany	Kajian Strategi Pengananan Kawasan Permukiman	Jurna Teknika : Jurnal Teoritis dan Terapan Bidang	penyusunan profil ini dilaksanakan dengan metode	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan berbasis program KOTAKU

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Kumuh Perkotaan Berbasis Program KOTAKU ( Kota Tanpa Kumuh) di Kota Kuala Kapuas	Kesehatan Vol 2, No 1, Oktober 2018 : 82 - 89	survey primer (pengambilan gambar) dan wawancara dengan warga setempat pada lokasi kelurahan Selat Hilir sebagai Kawasan permukiman kumuh yang paling dominan ada di Kota Kuala Kapuas	dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	di Kota Kuala Kapuas menggunakan sinergi platform kolaborasi antara Pemerintah Daerah dan pemangku kepentingan lainnya Kota pembangunan infrastruktur berbasis masyarakat untuk mempercepat penanganan kumuh perkotaan dan Gerakan 100-0-100 dalam rangka mewujudkan permukiman yang layak huni, produktif, dan berkelanjutan
7	Ade Masya Resa, zulfan Saam, Suardi Tarumun	Strategi Penataan Kawasan Permukiman Kumuh Perkotaan Kampung Bandar Kota Pekanbaru	Jurnal Dinamika Lingkungan Indonesia, Juli 2017 : 117 - 127 Volume 2 Nomor 2, ISSN 2356-2226	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif melalui pengamatan lapangan, wawancara, dan diskusi dengan para stakeholder	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan	Berdasarkan hasil analisis kondisi fisik, sosial budaya, ekonomi dan lingkungan pada kawasan permukiman kumuh Kampung Bandar, dapat diidentifikasi dan dianalisa faktor penyebab kekumuhan yang ada, antara lain: belum adanya rencana tata ruang

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
					prasarana serta peran pemerintah daerah	sebagai legalitas acuan pembangunan, layanan infrastruktur permukiman belum memadai, rendahnya daya beli masyarakat, belum optimalnya penegakan aturan,
8	Risky Yustiani P, Retnayu Prasetyanti, Hamidah Rosidanti S.	Penataan Pemukiman Kumuh Terintegrasi di Kota Semarang	IJPA - The Indonesian Journal Of Public Administration Volume 7 Nomor 1, Juni 2021	Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode penelitian deskriptif yang mengkombinasikan teknik penelitian literature review dan data sekunder	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil penelitian menjelaskan bahwa program KOTAKU membantu pemerintah dalam mengatasi masalah permukiman kumuh dan kesejahteraan masyarakat setempat. Skema kampung tematik dan kampung pelangi yang diterapkan mempunyai tujuan yang saling berkaitan satu dan yang lainnya yaitu 4E (etos, ekosistem, edukasi dan ekonomi).
9	Paulus Bawole dan Haryati Sutanto	Pendampingan Masyarakat dalam	Jurnal Atma Inovasia (JAI) Volume	Metode pelaksanaan pengabdian kepada	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu	Dari hasil kunjungan lapangan didapatkan informasi tentang

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		perencanaan penataan permukiman kumuh di Kampung Pedak Baru, Bantul	3,Nomor 6, 6 November 2023	masyarakat ini diawali dengan penelitian yang menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis deskriptif untuk mengeksplorasi potensi dan sumberdaya kampung kota di kawasan tepi sungai Gajahwong	metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	keadaan fisik permukiman di Kampung Pedak Baru yang kualitas lingkungannya sangat buruk. Beberapa keadaan fisik di wilayah Kampung Pedak Baru yang buruk dapat dikelompokkan menjadi fasilitas sarana - prasarana dan Ketidakteraturan Bangunan
10	M. Iqbal Tawakal Al - Akbar	Upaya Penyelesaian Permasalahan Permukiman Kumuh dalam Rangka Perwujudan Poin Ke-11 Sustainable Development Goals Kota dan Permukiman	Skripsi Jurusan Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sriwijaya Tahun 2021/2022	Penelitian ini menggunakan teori konsep implementasi rezim internasional sebagai pisau analisis dalam penelitian dengan melihat bagaimana Indonesia mengimplementasi kan rezim internasional SDGs	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta	Hasil dari penelitian ini Indonesia melakukan implementasi rezim internasional SDGs dalam rangka mewujudkan setiap tujuan di dalamnya dengan integrasi menyeluruh dari fase retifikasi sampai akhirnya menghasilkan perubahan sikap bagi kelompok terkait berdasarkan produk hukum

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Berkelanjutan di Kota Yogyakarta		ke dalam keseluruhan tatanan negara.	peran pemerintah daerah	dan program yang dikeluarkan
11	Yaskinul Anwar, Iya setyasih dan Herlan	Partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang	Journal of Education, Humaniora and Social Sciences (JEHSS) ISSN 2622-3740 (Online) Vol 4, No. 1, Agustus 2021: 584-591, DOI	Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif yakni digunakan untuk melakukan kajian partisipasi masyarakat terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Tingkat partisipasi terhadap penanganan permukiman kumuh di Kampung Ketupat Kecamatan Samarinda Seberang berdasarkan hasil skor kuesioner dapat dilihat untuk tahap perencanaan, tahap pelaksanaan, dan pemanfaatan hasil termasuk dalam kategori sangat tinggi sedangkan tahap evaluasi dan monitoring masuk kategori tinggi
13	Beby S. D Banteng	Analisis Keberhasilan Partisipasi Masyarakat Dalam Upaya Peningkatan Kualitas	Prosiding PESAT (Psikologi, Ekonomi, Sastra, Arsitektur & Teknik Sipil)	Pengumpulan data menggunakan Participatory Rural Appraisal /PRA maka data primer diambil dengan wawancara melalui	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup,	Hasilnya menunjukkan Keberhasilan pemerintah melibatkan peran serta dan partisipasi masyarakat di Kota Gorontalo di pengaruhi oleh adanya

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Permukiman Kumuh di Kota Gorontalo	Vol. 6, Oktober 2015 Universitas Gunadarma - Depok - 20-21 Oktober 2015 ISSN: 1858-2559	diskusi kelompok atau fokus grup diskusi (fgd), wawancara mendalam, survei lapangan dan pengamatan secara cepat	vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	penerapan prinsip keadilan dan kolaboratif pembangunan yang digunakan oleh para fasilitator pendamping, para pengurus lembaga pemberdayaan masyarakat desa/lpm dan badan keswadayaan masyarakat/bkm.
14	As'ari, Ruli, Siti Fadjarani	Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan	JURNAL GEOGRAFI Vol. 15 NO. 1 UNNES	Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif.. Analisis kawasan dan wilayah perencanaan dilakukan secara sistematis dilakukan dengan meninjau aspek; 1) perkembangan sosial-kependudukan, 2) prospek pertumbuhan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil Penelitian dapat diketahui bahwa konsep penataan permukiman kumuh yang cocok untuk dikembangkan dalam penataan lingkungan yaitu Model Land Sharing, yaitu penataan ulang di atas lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat cukup tinggi.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
				ekonomi, 3) daya dukung fisik dan lingkungan, selain itu analisis dilakukan dengan analisis SWOT		
15	Ade Guna Saputra	Peran Masyarakat dalam Program Kota tanpa kumuh permukiman pesisir Kelurahan Pangli-Ali Kabupaten Majene Provinsi Sulawesi Barat	Tesis Program Magister Manajemen Perkotaan Sekolah Pascasarjana Universitas Hasanuddin Makassar Tahun 2021	Metode analisis data yang digunakan adalah pengambilan data menggunakan simple random sampling dengan kuisisioner jumlah sampel sebanyak 80 KK. Teknik analisis data yang digunakan adalah deskriptif kualitatif untuk mengidentifikasi bentuk dan peran masyarakat wilayah pesisir pada program kota tanpa kumuh, dan analisis SWOT.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran masyarakat pada program Kotaku dalam bentuk pengambilan keputusan, menunjukkan kurang lebih setengah dari jumlah KK yang aktif mengikuti rapat program kotaku dan memberikan informasi tentang isu sosial, ekonomi, dan lingkungannya.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
16	Chalimatus Sakdiah dan Dian Rahmawati	Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Kawasan DAS Metro Kota Malang Berdasarkan Prinsip Sustainable Development Goals (SDGs)	Jurnal Teknik ITS Vol 9, No. 1, (2020) ISSN : 2337-3539 (2301-9271 Print)	Penelitian ini melewati 3 tahap analisis, yaitu tahap pertama untuk mengetahui kesesuaian kebijakan yang ada di Kota Malang dengan prinsip SDG's. Tahap kedua yaitu menentukan karakteristik permukiman kumuh yang ada di kelurahan sekitar DAS Metro yaitu Kelurahan Bandulan, Bandungrejosari, Sukun, dan Tanjungrejo. Dan tahapan terakhir yaitu merumuskan strategi penanganan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil dari penelitian ini berupa strategi penanganan permukiman kumuh yang dirinci berdasarkan hasil karakteristik yang didapatkan.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
				permukiman kumuh menggunakan metode analisis triangulasi.		
17	Nurrokhman, Indra Suharyanto, Hery Kristiyanto, Erlina, Singgih Subagyo, Suryanto, sukarno, Fattah Setiawan Santoso, Surifah	Evaluasi Pelaksanaan Pemberdayaan Lingkungan Permukiman Berbasis Komunitas di Kawasan Bantaran Sungai Kota Yogyakarta	JURNAL NUSANSAAKADEMIK Jurnal Pembangunan Masyarakat (p)ISSN: 1858-2826; (e)ISSN: 2747-0954 Vol. 8 No. 1, Juni 2023, p. 89 - 102	Instrument pengumpulan data adalah observasi dan wawancara serta dokumentasi	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Intervensi pemerintah melalui Program PTSL dalam pelaksanaan PLPBK telah memberikan dampak signifikan kepada tata hunian di kawasan Bantaran Sungai Gajahwong
18	Wahidatul Rizqi Firianti	Penataan Kawasan Sungai Winongo Berbasis Partisipasi Masyarakat di Pakuncen Yogyakarta	Jurnal Pemberdayaan Masyarakat: Media Pemikiran dan Dakwah Pembangunan ISSN: 2580-863X (p); 2597-	Data dikumpulkan melalui proses wawancara dan observasi. Proses penataan kawasan ini melalui enam tahap, yakni assessment	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi,	Studi ini menemukan bahwa program penataan kawasan sungai berbasis partisipasi masyarakat berimplikasi positif. Implikasi penataan tersebut terlihat dalam perubahan kondisi fisik (lingkungan),

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
			7768 (e); Vol. 3, no. 1 (2019), hal. 215- 240, doi: 10.14421/jpm.20 19.031-10	(identifikasi masalah), perencanaan, lobbying, pelaksanaan, monitoring, dan evaluasi.	vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	perubahan perilaku masyarakat, dan kesadaran masyarakat untuk menjaga permukiman yang lebih asri. Pada aspek lain, kegiatan tersebut dapat menumbuhkan semangat gotong royong dan peningkatan ekonomi masyarakat. Namun demikian, penataan kawasan sungai Winongo masih ditemukan sebagian remaja menjadikan lokasi bantaran sebagai ajang berkumpul yang tidak produktif. Ajang ini dianggap dapat meresahkan masyarakat karena tidak sesuai dengan normal sosial. Kondisi ini perlu ada pendampingan khusus kepada remaja yang berada pada masa pubertas.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
19	Ardi Irawan, John Bimasari, Wartono	Analisis Strategi Penanganan Permukiman Kumuh di Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas	Suluh Pembangunan: Journal of Extension and Development Vol 5, No. 2, Agustus Tahun 2023, Hal 94-102	Penelitian ini menggunakan metode survei, pemilihan responden secara sengaja (purposive sampling) sebanyak 14 orang yang semuanya merupakan Pegawai Negeri Sipil yang bekerja di kantor pemerintahan. Metode analisis yang digunakan adalah Analisis SWOT	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalitas non ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil analisis menunjukkan bahwa kawasan permukiman di Kecamatan Tugumulyo berada dalam kuadran I dengan kategori kebijakan pertumbuhan yang agresif (growth oriented strategy). Beberapa strategi yang dapat dilakukan meliputi optimalisasi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT), optimalisasi implementasi program CSR (Corporate Social Responsibility), pemetaan tugas para pemangku kepentingan, dan optimalisasi pembangunan rumah susun.
20	Andi Lestari Sulaiman	Proses Kolaborasi Penanganan Permukiman Kumuh Melalui Program Kota	Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian, dan Pengembangan Kota Bandung	Metode penelitian dilakukan dengan menggunakan pendekatan penelitian kualitatif, dengan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel	Proses kolaborasi dalam penanganan permukiman kumuh melalui program KOTAKU di Kota Bandung belum optimal dilaksanakan,

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Tanpa Kumuh (Kotaku) di Kota Bandung (Studi Kasus: Kelurahan Tamansari Kecamatan Bandung Wetan)		menggunakan metode studi kasus kasus. Penelitian ini memusatkan diri secara intensif pada satu obyek tertentu yang mempelajarinya sebagai suatu kasus	penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	dikarenakan masih terdapat tumpang tindih kepentingan, komunikasi yang tidak terarah, dan pemahaman pelaksana program masih rendah
21	Muhammad Helmi Setiawan	Strategi Penanganan Sanitasi Kawasan Permukiman Kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah	Tugas Akhir Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Universitas Islam Riau Tahun 2020	Metode dan analisis yang digunakan ialah teknik analisis deskriptif kualitatif dan kuantitatif dengan skala likert, serta menggunakan metode Probability Sampling dengan jenis Simple Random Sampling	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil dari penelitian ini adalah karakteristik sanitasi permukiman kumuh di Kecamatan Kuantan Tengah masih belum sesuai standar teknis, di mana hasil tingkat permasalahannya di Desa koto Taluk dan Desa Sawah dengan indikator fisik, pelaksana, dan perilaku yaitu dengan tingkat sedang, tetapi rata-rata tingkat permasalahan dominan lebih tinggi di Desa Koto Taluk. Adapun analisa SWOT terdiri atas

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
						strategi S-O, S-T, W-T, dengan keterkaitan antara drainase lingkungan, air limbah, dan persampahan dalam upaya penanganan sanitasi di Kecamatan Kuantan Tengah.
22	Tamrin Robo dan Endang Purwati	Mitigasi pertumbuhan pemukiman kumuh di kawasan padat penduduk	Jurnal Geocivic Vol 4, Nomor 1, April 2022 E-ISSN. 2722-3698	Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif dengan tujuan untuk membuat gambaran faktual dan akurat mengenai fakta, sifat-sifat serta hubungan antara fenomena yang di selidiki.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Pelaksanaan mitigasi dalam penataan permukiman mempertimbangkan berbagai aspek atau dimensi seperti seperti menyesuaikan lokasi dengan rencana tata ruang, status lahan, lokasi/posisi lokasi, tingkat kepadatan penduduk, tingkat kepadatan bangunan, fisik, kondisi sosial, ekonomi dan budaya masyarakat setempat.
23	Finisia Tiarawati	Partisipasi masyarakat dalam penataan daerah kumuh	Skripsi (Perpustakaan Universitas Airlangga)	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing	Penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam perencanaan

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
				dengan berfokus pada proses yang sedang berlangsung pada penelitian	dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	pembangunan belum menunjukkan masyarakat partisipatif
24	Zeno Triyoga Amintharso	Penataan Pemukiman kumuh di kawasan pesisir berbasis masyarakat	Skripsi Jurusan Teknik Perencanaan Wilayah dan Kota Fakultas Teknik Sipil dan Perencanaan Institut Teknologi Nasional Malang Tahun 2015	Analisa yang dilakukan yaitu analisa deskriptif empiris, analisa kebutuhan sarana & prasarana,	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil akhir penelitian adalah berupa rumusan konsep perencanaan infrastruktur berbasis masyarakat.
25	Novliza Eka Patrisia	Penataan Perumahan Kumuh Kota	Jurnal Professional FIS UNIVED Vol. 4	Metode penelitian yang digunakan adalah metode	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu	Penanganan Kawasan Pemukiman kumuh di perkotaan yang

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Berbasis Kawasan	No. 2 Desember 2017	penelitian kualitatif dengan berfokus pada proses yang sedang berlangsung pada penelitian	metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	berbasis kawasan harus dilandasi oleh karakteristik lahan dan sekitarnya. Hal ini akan menentukan konsep, strategi dan bentuk penanganannya. Dalam penanganannya ada beberapa pertimbangan utama antara lain masalah status tanah, perkembangan kawasan dan dinamikanya, dan peran serta masyarakat.
26	Noegi Noegroho	Penataan Perumahan Kumuh di perkotaan Berbasis Kawasan	Comtech Vol 1 No 2 Desember 2010 : 1033 - 1040	Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif dengan berfokus pada proses yang sedang berlangsung pada penelitian	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta	Penangan Kawasan Pemukiman kumuh di perkotaan yang berbasis kawasan harus dilandasi oleh karakteristik lahan dan sekitarnya. Hal ini akan menentukan konsep, strategi dan bentuk penanganannya. Dalam penanganannya ada beberapa pertimbangan utama antara lain masalah

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
					peran pemerintah daerah	status tanah, perkembangan kawasan dan dinamikanya, dan peran serta masyarakat.
27	Rofik Shohibul Wafa, Bagas Armandia, Laras Tinata, Haikal Fahmi Herdyana	Peningkatan Tata Ruang Dan Kualitas Pemukiman Kumuh	Semsrestek 2023 –ISSN : 2621–5934 p–ISSN : 2621–7112	Pendekatan teknis yang dilakukan bertujuan untuk memudahkan konsultan dalam melakukan pengamatan dan analisa di lapangan yang pertama dengan menggunakan Analisa dari data SIG. Mengacu pada maksud, tujuan dan sasaran dari DED Perencanaan Penataan Kawasan Kumuh Kecamatan Banjarsari, maka Metode Pendekatan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Berdasarkan hasil kajian tersebut teridentifikasi kawasan kumuh baru di 10 Kecamatan tersebut dari hasil pengumpulan data dari SIG sehingga dalam pelaksanaannya dibutuhkan perencanaan teknis dari masing-masing kawasan kumuh tersebut berdasarkan indikator kekumuhannya.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
				yang dilakukan adalah : pendekatan normatif, pendekatan partisipatif, pendekatan Teknis-Akademis.		
28	Niken Dyah Nawang Wulan, Andre Prasetyo Widodo	Strategi Pembangunan dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh di Jawa Timur	Jurnal Administrasi Politik dan Sosial, Vol 1 No.2 Agustus 2020 ISSN ; 2722-161X e_ISSN : 2722-1601	Menggunakan metode kualitatif dengan cara deskriptif analisis melalui data yang diperoleh dari studi kepustakaan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Strategi pemerintah direalisasikan dalam bentuk program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang mendukung pemerintah daerah sebagai nahkoda dalam penanganan permukiman kumuh. Hasil studi komparatif dari wilayah Sidorajo dan Malang diketahui pelaksanaan program maupun capaian yang telah diperoleh.
29	Fitrah Angriani, Irsyadi Siradjuddin, Andi Ilham AP	Studi Kawasan Permukiman Kumuh Pedesaan (Dutaku) Berbasis GIS di	JURNAL TEKNIK ITS Vol. 10, No. 2, (2021) ISSN: 2337-3539	Untuk mengetahui tingkat kekumuhan dilakukan analisis pembobotan menurut variabel dan indikator	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel	Konsep penanganan terhadap tingkat kekumuhan kawasan permukiman di Desa Polewali dan Desa Taccorong yaitu 1.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Desa Polewali dan Desa Taccorong Kecamatan Gantarang Kabupaten Bulukumba	(2301-9271 Print)	terukur sebagaimana rumus penilaian dari Departemen Permukiman dan Prasarana Wilayah, Kementrian PUPR	penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Membangun vertical housing/rumah susun, 2. Peningkatan kualitas jalan dengan menggunakan permeable paving dan beton, 3. Pembuatan drainase lingkungan disepanjang jalan agar tidak terjadi genangan disepanjang jalan, 4. Peningkatan pelayanan air bersih lebih ditingkatkan agar masyarakat lebih mudah mendapatkan air, 5. Penyediaan tempat sampah disetiap rumah harus diterapkan dengan baik, 6. Melakukan penataan ulang, dan 7. Melakukan penanaman pohon di sepanjang jalan.
30	Nurhasanah	Implementasi Kebijakan	Jurnal Inovasi Ilmu Sosial dan	penelitian ini menggunakan jenis	Metode yang digunakan di dalam	Program ini untuk meningkatkan akses

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Program KOTAKU (Kota Tanpa Kumuh) Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	Politik ISSN 2656-1565 DOI: 10.33474/jisop Vol. 1   No. 1   April 2019   Hal. 58 - 70	penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif	disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	terhadap infrastruktur dan pelayanan dasar di kawasan kumuh perkotaan untuk mendukung terwujudnya pemukiman perkotaan yang layak huni, produktif dan berkelanjutan. Adapun faktor penghambat dari program KOTAKU adalah kurangnya partisipasi masyarakat dalam keikutsertaan dalam pelaksanaan kegiatan program KOTAKU. Faktor pendukung dari program KOTAKU masih ada sebagian masyarakat yang masih ikut berpartisipasi dalam kegiatan program KOTAKU bahkan dengan sukarela memberikan bantuan berupa tenaga maupun materi.
31	Anton Simbang, Rosyani, Suandi	Keterkaitan Partisipasi	JURNAL PEMBANGUNA	Pengukuran melalui penyebaran	Metode yang digunakan di dalam	Penelitian ini menunjukkan bahwa ada hubungan

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Masyarakat Terhadap Kualitas Lingkungan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Rajawali Dan Kelurahan Budiman Kecamatan Jambi Timur Kota Jambi	N BERKELANJUT AN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019	kuisisioner di lokasi permukiman kumuh untuk mengetahui fenomena sosial masyarakat menggunakan skala likert dengan standart pengelolaan kualitas lingkungan permukiman yang dilakukan oleh masyarakat. Analisis hubungan antara partisipasi masyarakat antara kualitas lingkungan permukiman dengan SPSS 24 yaitu korelasi spearman	disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	antara partisipasi masyarakat dengan kualitas lingkungan permukiman kumuh pada Kelurahan Rajawali dan Kelurahan Budiman. Pemberdayaan harus ditingkatkan untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan permukiman dan mencegah permukiman kumuh baru
32	Noegi Noegroho	Partispasi masyarakat dalam penataan permukiman kumuh di kawasan	Comtech Vol 3 No. 1 Juni 2012 : 23-33	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan terhadap partisipasi	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel	Partisipasi masyarakat dalam kegiatan ini sudah mencapai tingkat discussion dan placation di mana masyarakat dapat berdiskusi dengan

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		perkotaan : studi kasus kegiatan PLP2K - BK di Kota Medan dan Kota Payakumbuh		masyarakat dengan teori Arnstein	penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	pelaksana kegiatan dan pemerintah
33	Kartika Puspa Dewi, Veronica A. Kumurur, & Rieneke L.E Sela	Penentuan Kualitas Permukiman berdasarkan kriteria Eco-Settlement di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado	Jurnal Spasial Vol. 6 No.1, 2019 ISSN 2442-3262	Metode penelitian menggunakan metode deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif, deskriptif kuantitatif berupa analisis skoring yang digunakan untuk mengetahui kualitas rumah sehat sedangkan deskriptif kualitatif digunakan untuk mendeskripsikan kualitas aspek-aspek lainnya.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil analisa diketahui bahwa kualitas permukiman di Kelurahan Sindulang Satu Kota Manado yang dinilai dengan menggunakan pendekatan kriteria eco-settlement yang terdiri dari masing-masing aspek, yaitu untuk kualitas aspek ekologi pada kriteria rumah sehat, kepadatan bangunan, kondisi jalan lingkungan, kondisi drainase, ketersediaan air bersih dan persampahan memiliki kualitas yang baik sedangkan untuk RTH dan proteksi

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
						pemadam kebakaran memiliki kualitas yang buruk dikarenakan tidak sesuai standar yang ada. Sedangkan untuk aspek ekonomi, sosial dan kelembagaan memiliki kualitas yang baik karena sudah sesuai dengan standar yang ada.
34	Yurizal Nurzen, Muhammad Safri, Nazarudin	Analisis Partisipasi Masyarakat Dalam Program Neighborhood Upgrading And Shelter Project (NUSP) Menuju Pembangunan Berkelanjutan di Wilayah Kumuh (Kabupaten Tanjung Jabung	JURNAL PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN eISSN: 2622-2310 (e); 2622-2302 (p), Volume 2. no (1) 2019	Metode yang digunakan adalah metode survey dengan pengambilan sampel secara Proportionate stratified random sampling, dimana jumlah sampel sebanyak 39 responden. Penentuan jumlah sampel mempergunakan metode Slovin	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	partisipasi masyarakat dalam program NUSP Di Kabupaten Tanjung Jabung Barat Kelurahan Bram Itam Kiri dari segi bentuk yang paling dominan adalah partisipasi dalam bentuk fisik (tenaga) yaitu 27%, dari segi tingkat partisipasi yang paling tinggi adalah partisipasi pada tingkat pelaksanaan yaitu 33%.

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Barat Kelurahan Bram Itam Kiri)		dengan pengolahan data secara deskriptif		
35	Sari Aji Pratiwi , Nana Novita Pratiwi , Vetti Puryanti	Partisipasi masyarakat dalam peningkatan kualitas permukiman kumuh di Parit Nenas Kelurahan Siantan Hulu	Jurnal Universitas Tanjungpura (UNTAN)	Metode penelitian yang digunakan ialah metode deksriptif dan asosiatif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan purpose sampling dalam pemilihan informan awal. Selanjutnya, menentukan sumber informasi dengan teknik snowball sampling diikuti dengan triangulasi untuk pengabsahan data.	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukan warga parit nenas melakukan program-program peningkatan kualitas permukiman kumuh sesuai dengan tahapannya. Warga berpartisipasi secara jenis dan model partisipasi yang terdiri atas pikiran, tenaga, pikiran dan tenaga, keahlian, barang, uang dan dana serta Can do, Like to, Enable to, Aksed to, dan Responded to. Ada kekurangan partisipasi dalam hal pemahaman program dan jenis partisipasi uang. Hal ini menyebabkan tingkat partisipasi masyarakat dikategorikan "Tokenisme" dan

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
						dikarenakan warga belum memiliki tingkat pemahaman dan kemampuan dalam tahap keberlanjutan program. Berdasarkan hasil penelitian, merekomendasikan perlunya langkah-langkah pendekatan yang lebih intens dan menarik untuk menarik partisipasi warga.
36	Assa Kamalia ,Suzanna Ratih Sari	Konsep Penataan Permukiman Kumuh Perkotaan Kabupaten Kudus Berbasis Pembangunan Berkelanjutan	Jurnal Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat UNSIQ, Vol 8 No. 3, 245-253	Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu observasi langsung pada objek penelitian	Metode yang digunakan di dalam d disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil penelitian menunjukkan Kondisi hunian yang tidak layak dan tidak sehat sehingga perlu dilakukan upaya upgrading permukiman yang sesuai dengan kondisi lingkungan dan perekonomian, pembukaan akses jalan, dan menyediakan sarana prasarana yang bermanfaat hingga masa depan

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
37	Reza Pirziliya, Yoskar Kadarisman	Partisipasi Masyarakat Dalam Implementasi Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) di Kawasan Kota Lama Kelurahan Tirtasiak Kecamatan Payung Sekaki Kota Pekanbaru	Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, April 2023, 9(8), 498-506	Jenis penelitian dalam penelitian ini yaitu metode penelitian kuantitatif deskripti	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Partisipasi masyarakat di wilayah studi dalam tahap perencanaan berada di kategori 'rendah'. Kemudian partisipasi masyarakat dalam tahap pelaksanaan berada di kategori 'rendah'. Lalu partisipasi masyarakat dalam tahap monitoring berada di kategori 'rendah'. Sedangkan partisipasi masyarakat dalam tahap pemanfaatan berada di kategori 'tinggi'. Faktor yang mempengaruhi adalah umur, jumlah tanggungan keluarga, tingkat pendidikan, dan lama menetap, ekonomi, dan pengetahuan. Namun yang paling menentukan adalah pengetahuan masyarakat terkait program KOTAKU
38	Muh. Faad Mauladi Irwan,	Evaluasi Partisipasi	Jurnal PBUP, SSN 2656-8705	Penelitian ini menggunakan	Metode yang digunakan di dalam	Hasil penelitian dapat menunjukkan bahwa

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
	Andi Muhibuddin, Haeruddin Saleh	Masyarakat Dalam Revitalisasi Kawasan Permukiman Kumuh (Studi Kasus: Kampung Gembira Gembrong, Jakarta Timur)	URSJ 6(1): 90-93, Desember 2023	metode analisis deskriptif dan teknik pengambilan sampel menggunakan purposeful sampling serta pengumpulan data menggunakan triangulasi data yang terdiri atas pengamatan, wawancara, dan data sekunder	disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	keterlibatan partisipasi masyarakat pada proses perencanaan tidak tercapai, dilihat dari fakta dilapangan bahwa masyarakat tidak ikut terlibat dalam proses perencanaan revitalisasi. Sehingga, penggunaan pola partisipasi masyarakat dengan teknik metode partisipasi pada Participatory Rural Appraisal (PRA) tidak dapat diketahui.
39	Zaenal Mutaqin	Studi Penentuan Prioritas Penanganan Lingkungan Permukiman Kumuh Menuju Kampung Berkelanjutan Studi Kasus : Kelurahan 29 Ilir	Tesis Program Studi Magister Ilmu Lingkungan Program Pascasarjana Universitas Lampung Bandar Lampung 2017	Penelitian menggunakan metode Analytical Hierarchy Process (AHP)	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi	Hasil temuan studi penentuan kegiatan prioritas permukiman kumuh perkotaan berdasarkan 3 pilar pembangunan berkelanjutan menunjukkan bahwa prioritas pertama yang perlu diperhatikan adalah aspek fisik

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Kecamatan Ilir Barat II Kota Palembang			sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	lingkungan, kedua adalah aspek sosial dan terakhir aspek ekonomi.
40	Made Isaka Riasmia, Ni Ketut Agusintadewia, Widiastuti a	Strategi Penanganan kawasan Tepian Sungai Tukad Yeh Poh Sebagai Recreational Waterfront Kabupaten Badung	Jurnal Pembangunan Wilayah dan Kota Vol. 18, No. 3, 2022, 272 – 282	Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan analisis deskriptif. Pengumpulan data menggunakan teknik Participatory Rural Appraisal (PRA).	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Hasil penelitian memaparkan strategi yang dilakukan dalam upaya peningkatan kualitas lingkungan, seperti perbaikan infrastruktur fisik, penyediaan ruang terbuka publik, dan penunjang kegiatan wisata air, seperti destinasi wisata kuliner dan olahraga. Selain itu juga, upaya lain dengan menerapkan sistem Eko-Drainase dan pembuatan biopori, penanganan sampah berbasis teknologi ramah lingkungan serta pengembangan destinasi wisata yang dapat dimanfaatkan dan dikelola berbasis masyarakat. Dengan membuat Kawasan Produktif

No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
						Pariwisata, maka perekonomian masyarakat meningkat, sehingga dapat berperan serta dalam menjaga lingkungan setempat.
41	Muhammad Zacky Rizkullah	Collaborative Governance Dalam Program Kota Tanpa Kumuh Di Kelurahan Dalam Bugis Kota Pontianak	Jurnal Institut Pemerintahan Dalam Negeri, Tahun 2024	Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara semi terstruktur (9 informan), dan dokumentasi	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalitas non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini adalah collaborative governance yang dilakukan dalam program KOTAKU dari kelima dimensi menurut teori Ansell dan Gash (2008) telah berjalan dengan baik kecuali pada dimensi pemahaman bersama. Dalam pelaksanaan program KOTAKU ditemukan faktor penghambat yaitu target yang tidak sesuai dengan tenggat waktu dan program yang tidak berkelanjutan
42	Sahroni	Pembelajaran Masyarakat Berbasis	Jurnal Mimbar Pendidikan	Penelitian ini menggunakan pendekatan dan	Metode yang digunakan di dalam disertasi saya yaitu	Penelitian menunjukkan bahwa telah terjadi perubahan perilaku positif;

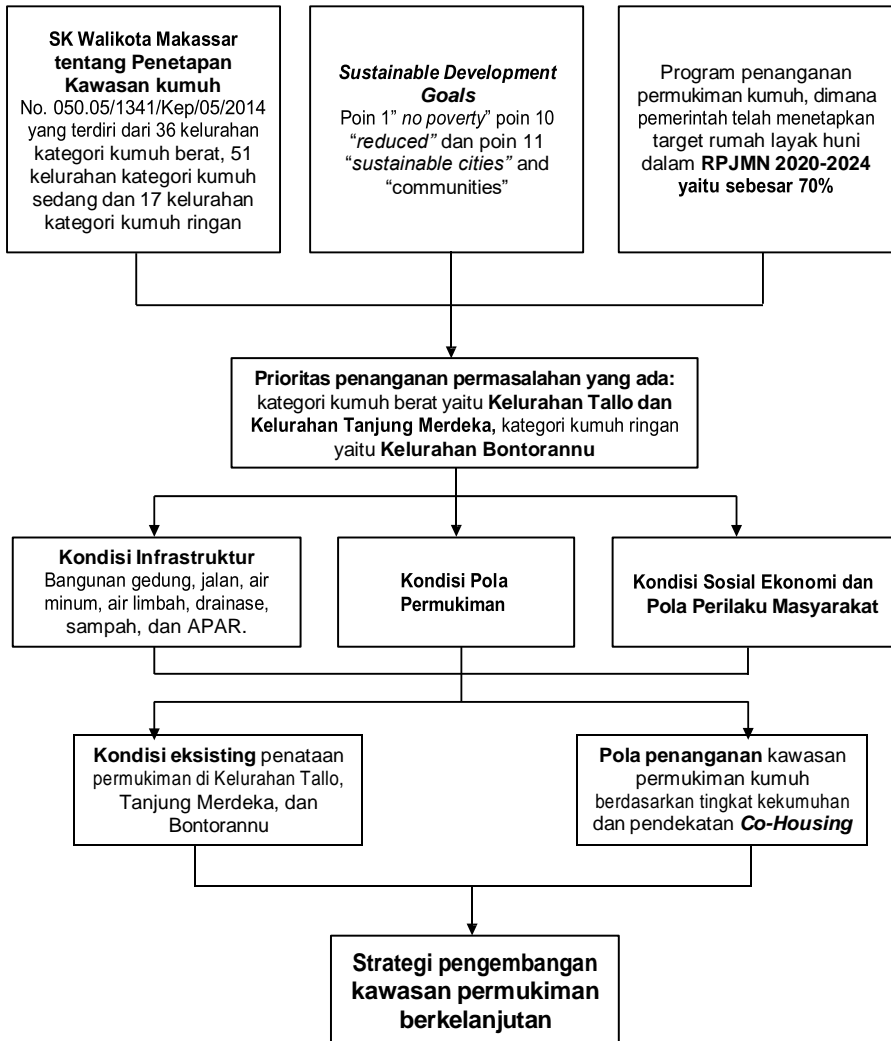
No.	Penulis	Judul	Sumber	Metode	Perbedaan	Hasil
		Masalah sebagai Strategi Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dalam Program KOTAKU		metode deskriptif-kualitatif. Data yang dikumpulkan menggunakan teknik studi dokumentasi, wawancara, dan observasi. Data kemudian dianalisis berdasarkan konsep pembangunan masyarakat, pembelajaran, dan pemberdayaan masyarakat	metode Co-Housing dengan scoring dengan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah	perkembangan kemampuan dalam memecahkan masalah; memaknai informasi; serta berpikir reflektif dan evaluatif pada masyarakat. Penelitian ini secara statistik memperoleh angka 30% terhadap kontribusi masyarakat

Beberapa penelitian sebelumnya yang sejenis adalah sebagai bahan dalam menyusun *state of the art*, terkait pengumpulan teori dan referensi yang akan mendukung penelitian. Artikel jurnal diatas dikumpulkan agar penelitian yang dilakukan menjadi semakin kuat, karena isi dari masing-masing artikel jurnal tersebut dapat dijadikan sebagai acuan. Dari penelitian ini didapatkan kebaharuan yang diketahui penelitian sejenis yaitu:

- a. Belum ada penelitian yang mengkaji permukiman dengan pendekatan Co-Housing yang mengkaitkan pola partisipasi masyarakat masyarakat setempat sebagai paramater yang ditinjau dalam menganalisis untuk mencapai permukiman yang berkelanjutan;
- b. Belum ada peneliti yang menganalisis tingkat kekumuhan dengan scoring dengan mengkaji dan menggabungkan variabel penelitian mencakup, vitalis non ekonomi, vitalitas ekonomi, status tanah, kondisi sarana dan prasarana serta peran pemerintah daerah;

### **1.7. Kerangka Pikir**

Kerangka pemikiran adalah suatu diagram yang menjelaskan secara garis besar alur logika berjalannya sebuah penelitian, dibuat berdasarkan pertanyaan penelitian (*research question*), dan merepresentasikan suatu himpunan dari beberapa konsep serta hubungan diantara konsep-konsep tersebut (Polancik, 2009 dalam Wahono, 2012).



Gambar 1. 4 Kerangka Pikir Penelitian

## BAB II TOPIK PENELITIAN I

### “KONDISI EKSISTING PENATAAN PERMUKIMAN KUMUH DI KELURAHAN TALLO, KELURAHAN TANJUNG MERDEKA, DAN KELURAHAN BONTORANNU”

#### 2.1. Abstrak

Permukiman kumuh menjadi tantangan utama dalam pembangunan kota berkelanjutan di Indonesia, termasuk di Kota Makassar. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu dengan pendekatan deskriptif kualitatif. Data diperoleh melalui observasi lapangan, wawancara masyarakat, dan studi dokumen sekunder. Tujuh indikator dianalisis: kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Hasil penelitian menunjukkan bahwa masing-masing kelurahan memiliki karakteristik dan permasalahan yang berbeda. Kelurahan Tallo menghadapi tekanan tinggi akibat kepadatan penduduk dan infrastruktur dasar yang minim. Kelurahan Tanjung Merdeka mengalami degradasi lingkungan akibat alih fungsi lahan dan belum optimalnya sistem sanitasi. Sementara itu, Bontorannu menunjukkan peningkatan signifikan pasca intervensi pembangunan, meskipun tantangan keberlanjutan masih ada. Pendekatan DPSIR digunakan untuk merumuskan respons kebijakan yang kontekstual dan berkelanjutan. Penelitian ini merekomendasikan intervensi infrastruktur dasar yang adaptif, penguatan kelembagaan lokal, dan partisipasi aktif masyarakat dalam perbaikan lingkungan permukiman.

**Kata kunci:** permukiman kumuh, kondisi eksisting, DPSIR, infrastruktur dasar, penataan kawasan

#### 2.2. Pendahuluan

Permukiman kumuh menjadi persoalan yang umum dijumpai di hampir seluruh kota besar di Indonesia, bahkan juga di berbagai kota pada negara-negara berkembang. Permasalahan ini dipicu oleh pesatnya pertumbuhan penduduk perkotaan, keterbatasan ketersediaan lahan hunian, serta kondisi ekonomi masyarakat berpenghasilan rendah yang belum memadai. Situasi tersebut mendorong sebagian masyarakat untuk menetap di kawasan dengan kualitas lingkungan yang rendah, keterbatasan infrastruktur dasar, dan kondisi sanitasi yang tidak memenuhi standar kelayakan. Secara umum, kawasan permukiman kumuh dicirikan oleh kepadatan bangunan yang tinggi, kondisi rumah

yang tidak layak dan tertata secara tidak teratur, keterbatasan akses terhadap layanan dasar seperti air bersih, sanitasi, dan drainase, jaringan jalan lingkungan yang sempit dan kurang memadai, serta tingkat kerentanan yang tinggi terhadap masalah kesehatan dan bencana, seperti banjir akibat sistem drainase yang tidak berfungsi optimal (D. K. Putri & Idajati, 2021).

Fenomena tersebut turut dipengaruhi oleh pesatnya arus urbanisasi, di mana peningkatan jumlah penduduk secara berkelanjutan mendorong kebutuhan akan hunian sebagai salah satu kebutuhan dasar manusia. Ketidakeimbangan antara pertumbuhan penduduk dan ketersediaan perumahan yang layak menyebabkan berkembangnya permukiman informal secara tidak terencana dan sulit dikendalikan. Perumahan dan kawasan permukiman, sebagai elemen fundamental dalam pemenuhan kebutuhan masyarakat, akan terus mengalami perkembangan seiring dengan dinamika pembangunan perkotaan serta penyediaan infrastruktur yang mendukung aktivitas sosial dan ekonomi masyarakat (O. V. J. Putri & Kurniawati, 2022).

Konsep permukiman, sebagaimana dikemukakan dalam Teori Eksistensi, mencakup dua unsur utama, yaitu wadah berupa hunian dan isi berupa manusia sebagai penghuninya. Oleh karena itu, meningkatnya kawasan permukiman kumuh tidak hanya menimbulkan permasalahan pada aspek fisik lingkungan, tetapi juga berimplikasi pada dimensi sosial serta tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup masyarakat yang tinggal di dalamnya (Maharani & Nurlaili, 2019). Dalam konteks global, pentingnya pembangunan kawasan permukiman yang layak juga tertuang dalam *Sustainable Development Goals* (SDGs), terutama pada tujuan ke-11 yaitu "Kota dan Permukiman yang Inklusif, Aman, Tangguh dan Berkelanjutan". SDGs menekankan perlunya upaya kolektif untuk menata kawasan permukiman agar semua warga kota memiliki akses yang setara terhadap infrastruktur dasar dan lingkungan yang sehat.

Kawasan permukiman kumuh umumnya diasosiasikan dengan berbagai aspek negatif yang mencerminkan kondisi lingkungan yang tidak layak huni. Meskipun setiap kawasan memiliki lokasi yang berbeda, karakteristik permukiman kumuh pada umumnya serupa, seperti kepadatan tinggi, infrastruktur buruk, dan sanitasi rendah (Joenso & Sari, 2020). Permukiman kumuh menjadi isu strategis dalam pembangunan perkotaan karena keberadaannya dapat menghambat kinerja ekonomi kota serta menurunkan efektivitas aktivitas kehidupan penghuninya (Fadjarani & Ruli As'ari, 2018).

Tidak hanya itu, permukiman kumuh di wilayah pesisir juga menjadi perhatian penting. Umumnya, kawasan ini memiliki taraf kehidupan yang berada di bawah standar nasional, dengan perumahan yang tidak tertata, minim fasilitas dasar, dan kurang mendapat perhatian dari pemerintah maupun masyarakat setempat (Dewi et al., 2019). Permukiman kumuh kerap dipersepsikan sebagai ruang yang berpotensi melahirkan berbagai bentuk penyimpangan sosial, termasuk tindak kriminal dan masalah sosial lainnya. Tingginya kepadatan hunian, arus pendatang yang besar, serta tingkat pengangguran yang relatif tinggi turut memperkuat stigma kawasan tersebut sebagai lingkungan yang rawan dan kurang sehat (Saharuddin, 2018).

Kondisi lingkungan pada kawasan permukiman kumuh umumnya tercermin dari karakteristik fisik dan sistem sanitasi yang tidak memadai, antara lain bangunan hunian semi permanen atau berdiri di atas perairan, jaringan jalan lingkungan yang belum berlapis perkerasan, keterbatasan akses terhadap air bersih, serta sistem drainase yang tidak tertata dengan baik. Selain itu, praktik pembuangan sampah dan limbah domestik secara sembarangan juga menyebabkan lingkungan menjadi kumuh, bau, dan tidak sehat (Marjuni et al., 2021). Permasalahan tersebut tidak terlepas dari dinamika pertumbuhan kota yang sangat pesat, sebagaimana terjadi di Kota Makassar.

Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan merupakan kota metropolitan dengan pertumbuhan penduduk yang tinggi. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik Kota Makassar tahun 2023, jumlah penduduk mencapai 1.474.393 jiwa, meningkat sebesar 2,94% dari tahun sebelumnya. Laju pertumbuhan penduduk sebesar 1,18% per tahun secara konsisten meningkatkan tekanan terhadap ruang kota, lahan permukiman, dan infrastruktur dasar (BPS, 2024). Akibatnya, beban terhadap sistem tata ruang dan infrastruktur kota semakin berat, terutama dalam penyediaan hunian layak bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

Salah satu dampak konkret dari kondisi tersebut adalah meluasnya kawasan permukiman kumuh. Berdasarkan Surat Keputusan Wali Kota Makassar No. 050.05/1341/Kep/05/2014, terdapat 103 kelurahan dari 143 kelurahan di Kota Makassar yang ditetapkan sebagai wilayah kumuh, dengan klasifikasi kumuh ringan, sedang, dan berat. Di antaranya, Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu termasuk sebagai kawasan kumuh dengan tingkat dan penyebab kekumuhan yang beragam. Tallo dan Tanjung Merdeka menghadapi persoalan sistemik terkait drainase buruk, kepadatan penduduk ekstrem,

dan minimnya akses terhadap air bersih dan sanitasi. Sementara itu, Bontorannu meskipun tergolong kumuh ringan, memiliki tantangan keberlanjutan terhadap hasil perbaikan infrastruktur yang telah dilakukan.

Mengingat kompleksitas permasalahan yang ada, diperlukan strategi penataan permukiman kumuh yang tidak semata-mata berfokus pada aspek teknis dan fisik, tetapi juga mengakomodasi dimensi sosial, kelembagaan, serta partisipasi masyarakat. Upaya penanganan kawasan kumuh perlu dilakukan secara kontekstual dengan menyesuaikan karakteristik dan kebutuhan spesifik tiap wilayah, serta melibatkan berbagai pemangku kepentingan secara kolaboratif. Melalui pendekatan yang terpadu dan berkelanjutan, intervensi yang diterapkan diharapkan mampu menghasilkan dampak jangka panjang yang lebih efektif dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Sejalan dengan hal tersebut, penelitian ini memiliki urgensi yang tinggi karena bertujuan untuk menganalisis secara komprehensif kondisi eksisting permukiman kumuh pada tiga kelurahan prioritas di Kota Makassar. Hasil penelitian diharapkan dapat menjadi rujukan dalam perumusan strategi penataan kawasan yang adaptif, berbasis data empiris, serta mendukung pembangunan kota yang berkelanjutan, inklusif, dan berkeadilan.

### **2.3. Teori Tentang Permukiman Kumuh**

Permukiman kumuh (*slum settlement*) merupakan fenomena perkotaan yang muncul sebagai akibat dari ketidakseimbangan antara pertumbuhan penduduk, urbanisasi, dan kemampuan pemerintah dalam menyediakan hunian yang layak. Permukiman kumuh ditandai oleh kondisi fisik lingkungan yang tidak memenuhi standar kelayakan, keterbatasan sarana dan prasarana dasar, serta rendahnya kualitas hidup masyarakat yang menempatnya.

Menurut UN-Habitat (2015), permukiman kumuh adalah kawasan permukiman yang memiliki satu atau lebih karakteristik berikut: kepadatan bangunan yang tinggi, kualitas bangunan yang rendah, keterbatasan akses terhadap air minum layak, sanitasi yang tidak memadai, serta tidak adanya jaminan status kepemilikan lahan (*security of tenure*). Definisi ini menekankan bahwa permukiman kumuh tidak hanya berkaitan dengan aspek fisik, tetapi juga aspek sosial, ekonomi, dan legalitas.

Dalam konteks nasional, berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman,

permukiman kumuh didefinisikan sebagai permukiman yang tidak layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi, serta kualitas bangunan dan sarana prasarana yang tidak memenuhi persyaratan teknis. Definisi ini menunjukkan bahwa permukiman kumuh merupakan hasil dari proses pembangunan yang tidak terencana dan tidak terkendali.

Secara teoritis, terbentuknya permukiman kumuh dapat dijelaskan melalui teori urbanisasi dan kemiskinan perkotaan. Menurut Turner (1972), permukiman kumuh merupakan bentuk adaptasi masyarakat berpenghasilan rendah terhadap keterbatasan akses terhadap hunian formal di perkotaan. Masyarakat dengan kemampuan ekonomi terbatas cenderung memilih membangun hunian secara informal di lahan yang tidak direncanakan, seperti bantaran sungai, sempadan pantai, atau lahan kosong yang tidak memiliki izin resmi.

Selain itu, teori ekologi perkotaan (*urban ecology theory*) yang dikemukakan oleh Burgess (1925) menjelaskan bahwa perkembangan kota mengikuti pola konsentris, di mana kelompok masyarakat berpenghasilan rendah cenderung menempati zona transisi yang memiliki kualitas lingkungan rendah. Zona ini sering berkembang menjadi kawasan permukiman kumuh akibat tekanan ekonomi dan kepadatan penduduk yang tinggi.

Dari perspektif pembangunan berkelanjutan, permukiman kumuh mencerminkan kegagalan sistem perencanaan kota dalam menyediakan hunian yang layak, aman, dan berkelanjutan. Menurut konsep pembangunan berkelanjutan, permukiman harus memenuhi tiga dimensi utama, yaitu dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi. Permukiman kumuh umumnya mengalami ketidakseimbangan pada ketiga dimensi tersebut, yang ditandai dengan degradasi lingkungan, rendahnya kesejahteraan masyarakat, dan terbatasnya akses terhadap pelayanan dasar.

Karakteristik utama permukiman kumuh meliputi:

1. Kondisi bangunan yang tidak layak huni
2. Kepadatan bangunan yang tinggi
3. Keterbatasan akses air bersih
4. Sistem sanitasi yang buruk
5. Sistem drainase yang tidak memadai
6. Pengelolaan sampah yang tidak baik
7. Kerentanan terhadap bencana dan kebakaran

Keberadaan permukiman kumuh memberikan dampak negatif terhadap kualitas lingkungan dan kehidupan masyarakat, seperti

meningkatnya risiko penyakit, pencemaran lingkungan, serta kerentanan sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, penanganan permukiman kumuh memerlukan pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan, yang tidak hanya berfokus pada perbaikan fisik, tetapi juga pemberdayaan masyarakat dan penguatan kelembagaan. Dengan demikian, permukiman kumuh merupakan fenomena multidimensional yang dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, lingkungan, dan kelembagaan, sehingga memerlukan strategi penanganan yang terintegrasi untuk mewujudkan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

#### **2.4. Teori Tentang Penataan Permukiman Kumuh**

Fenomena permukiman kumuh terjadi akibat perluasan fungsi permukiman pada area non-pemukiman karena berbagai faktor pendorong, utamanya adalah kemiskinan. Penataan permukiman kumuh mengacu pada pola dan pendekatan penataan permukiman kumuh. Terdapat pola atau model penataan permukiman kumuh mengacu pada Direktorat Jenderal Cipta Karya Kementerian PUPR sebagai alternatif dalam menangani masalah permukiman kumuh di perkotaan antara lain :

- a. Model *Land Sharing I*. Model Land Sharing I merupakan pendekatan penataan ulang kawasan yang diterapkan pada lahan dengan tingkat kepemilikan masyarakat yang relatif tinggi. Penerapan model ini mensyaratkan beberapa kondisi, antara lain: (1) kepemilikan atau penguasaan lahan secara legal oleh masyarakat cukup dominan meskipun dengan luasan terbatas, (2) tingkat kekumuhan kawasan tergolong tinggi namun masih tersedia ruang yang memadai untuk penyediaan prasarana dan sarana dasar, serta (3) susunan bangunan eksisting tidak teratur dan tidak mengikuti pola tata ruang yang jelas.
- b. Model *Land Sharing II*. Model Land Sharing II menitikberatkan pada mekanisme pembagian lahan antara pemilik lahan dan penghuni informal. Model ini umumnya diterapkan pada kondisi: (1) lahan dimiliki oleh satu pihak, baik individu maupun institusi, (2) lahan awalnya kosong namun kemudian dihuni secara ilegal oleh sekelompok masyarakat, (3) pemilik lahan berencana memanfaatkan kembali lahannya dengan kesepakatan pembagian, di mana sebagian besar lahan tetap menjadi milik pemilik dan sebagian lainnya dialokasikan bagi penghuni, (4) terdapat kesepakatan bersama antara kedua belah pihak, serta (5) masyarakat terlibat secara aktif dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan.

- c. Model *Land Readjustment*. Model Land Readjustment merupakan upaya penataan ulang lahan yang dilakukan melalui pengaturan kembali bidang-bidang tanah. Model ini diterapkan pada kondisi: (1) lahan yang sebelumnya diperjualbelikan secara tidak terencana, (2) kawasan telah dihuni dengan bentuk lahan tidak beraturan serta minim sarana dan prasarana lingkungan seperti jalan, ruang terbuka hijau, dan jalur pedestrian, (3) pemilik lahan memiliki keinginan untuk meningkatkan kualitas lingkungan dan nilai ekonomi lahan, (4) penataan dilakukan dengan pembagian proporsi lahan sebesar 70% untuk kepentingan pemilik dan 30% untuk fasilitas umum, serta (5) pelaksanaan dilakukan secara kolektif atas persetujuan seluruh pihak terkait.
- d. Model Konsolidasi Lahan (*Land Consolidation*). Konsolidasi lahan merupakan model pengelolaan tata guna lahan melalui penataan kembali penguasaan dan pemanfaatan bidang tanah. Tujuan utama dari model ini adalah mengubah kawasan yang awalnya tidak tertata menjadi kawasan yang teratur, dilengkapi dengan prasarana dan sarana pendukung yang memadai. Pelaksanaannya dilakukan secara swadaya oleh masyarakat dengan dukungan pengaturan yang memungkinkan optimalisasi pemanfaatan lahan.
- e. Model *Resettlement*. Model resettlement atau permukiman kembali umumnya diterapkan melalui program transmigrasi. Pendekatan ini dilakukan dengan memindahkan penduduk dari wilayah dengan tingkat kepadatan tinggi ke daerah yang masih jarang penduduk. Tujuan utama dari resettlement adalah memperluas kesempatan kerja, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, serta mendorong pemerataan pembangunan dan integrasi nasional baik dari aspek ekonomi maupun sosial.
- f. Model Pembangunan Rumah Susun. Pembangunan rumah susun merupakan strategi penanganan permukiman perkotaan dengan cara mengubah kawasan padat penduduk yang tidak layak huni menjadi hunian yang memenuhi standar kelayakan. Pendekatan ini dilakukan dengan mengoptimalkan pemanfaatan lahan melalui pembangunan vertikal, sehingga kebutuhan ruang hunian dapat dipenuhi tanpa memperluas penggunaan lahan.
- g. Model Program Perbaikan Kampung atau *Kampung Improvement Program* (KIP). Kampung Improvement Program (KIP) merupakan pendekatan penataan kawasan berbasis partisipasi masyarakat yang bertujuan meningkatkan kualitas lingkungan permukiman serta pemenuhan kebutuhan dasar warga. Prinsip utama dari program ini adalah pemberdayaan masyarakat, di mana warga berperan sebagai subjek pembangunan sekaligus penerima manfaat sumber

daya kota untuk meningkatkan kesejahteraan dan kapasitas sosial-ekonominya.

Penelitian ini menggunakan berbagai teori pembangunan berkelanjutan yang relevan dengan penanganan kawasan kumuh, seperti Teori Pembangunan Berkelanjutan (*Sustainable Development Theory*), yang menekankan pada pencapaian keseimbangan antara pembangunan sosial, ekonomi, dan ekologis. Berdasarkan temuan lapangan, penerapan teori ini sangat relevan, terutama dalam merumuskan strategi pengembangan kawasan permukiman berkelanjutan di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu. Secara khusus, temuan penelitian menunjukkan bahwa permasalahan drainase, sanitasi, kualitas bangunan, serta pengelolaan limbah dan sampah yang ditemukan di lapangan selaras dengan kerangka teori tersebut, yang menekankan pentingnya intervensi terpadu pada aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan untuk mewujudkan permukiman berkelanjutan.

## **2.5. Metode**

### **1. Tempat dan Waktu**

Penelitian ini dilaksanakan di tiga kelurahan di Kota Makassar yang telah ditetapkan sebagai kawasan kumuh berdasarkan SK Walikota Makassar No. 050.05/1341/Kep/05/2014, yaitu Kelurahan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka, dan Kelurahan Bontorannu. Pelaksanaan penelitian dimulai pada bulan November 2024 hingga Maret 2025, yang mencakup proses observasi lapangan, pengumpulan data sekunder dan primer, serta analisis data dan penyusunan laporan penelitian.

### **2. Metode Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif. Tujuannya adalah untuk mengeksplorasi dan memetakan kondisi eksisting penataan permukiman kumuh. Secara umum, penelitian ini memberikan gambaran atau uraian yang bersifat deskriptif tentang fenomena penataan permukiman kumuh (Sugiyono, 2011). Pemilihan metode dan pendekatan penelitian didasarkan pada jenis data yang digunakan dan tujuan penelitian, yaitu untuk menganalisis, menginterpretasi, dan menyajikan data dan informasi (Achmadi & Narbuko, 2004).

### **3. Prosedur Penelitian**

Pelaksanaan penelitian ini dilakukan melalui tahapan sistematis untuk memperoleh data dan informasi kondisi eksisting penataan permukiman kumuh di wilayah studi. Tahapan tersebut meliputi:

- a. Observasi Lapangan  
Mengidentifikasi permasalahan utama permukiman kumuh di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu berdasarkan studi pendahuluan, observasi awal, dan data sekunder.
- b. Studi Literatur dan Kebijakan  
Mengkaji indikator permukiman kumuh menurut regulasi dan literatur akademik. Seperti Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh, RPJMD, RTRW, dan dokumen Rencana Penataan Permukiman.
- c. Pengumpulan Data
  - Data Primer: Observasi langsung ke lokasi kelurahan sasaran (Tallo, Tanjung Merdeka, Bontorannu) untuk menilai kondisi eksisting berdasarkan indikator kondisi bangunan gedung, jalan lingkungan, penyediaan air minum, drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan sampah, dan proteksi kebakaran. Serta melakukan dengan warga setempat.
  - Data Sekunder: Peta administrasi, data dari BPS, PUPR, Bappeda, dan instansi terkait.
- d. Pengolahan Data
  - Melakukan klasifikasi kondisi eksisting berdasarkan indikator yang ditentukan dalam Permen PUPR.
  - Analisis DPSIR (Driver–Pressure–State–Impact–Response)
- e. Penyajian Data  
Menyajikan hasil analisis kondisi eksisting secara naratif dan visual (diagram dan tabel).

## 2.6. Hasil dan Pembahasan

### a. Hasil

1. Kondisi Eksisting Penataan Wilayah Permukiman Kumuh  
Berdasarkan hasil wawancara dengan masyarakat dan observasi lapangan yang dilakukan pada bulan Januari 2025, kondisi eksisting infrastruktur dasar permukiman di Kelurahan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka, dan Kelurahan Bontorannu menunjukkan berbagai ketidaksesuaian dengan standar kelayakan permukiman. Hasil pengamatan terhadap tujuh variabel utama, yaitu:

a) Kondisi Bangunan Gedung

**Kelurahan Tallo** merupakan salah satu wilayah dengan karakteristik permukiman padat dan tidak terencana yang terletak di area pesisir utara Kota Makassar. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari Dasawisma PKK Kota Makassar, Kelurahan Tallo terdiri dari 5 RW dan 26 RT, jumlah penduduk 6.578 jiwa. Sarana bangunan terdiri dari 3 sarana pendidikan, 2 sarana kesehatan, 5 tempat ibadah, dan 1 kantor pemerintahan. Jumlah bangunan di wilayah ini tercatat sebanyak 1.565 unit, 1.451 rumah dalam kategori rumah sehat dan 114 rumah kategori kurang sehat.

Sebagian besar bangunan di Kelurahan Tallo bersifat semi permanen, dibangun dengan material campuran seperti kayu, seng, dan batu bata. Tingkat kepadatan sangat tinggi, dengan jarak antar rumah yang sempit dan tidak adanya gang pemisah yang layak. Banyak rumah menunjukkan kerusakan fisik serta ventilasi yang buruk, yang mengindikasikan kondisi hunian yang belum memenuhi standar kelayakan.



*Gambar 2. 1 Kondisi Bangunan di Kelurahan Tallo*

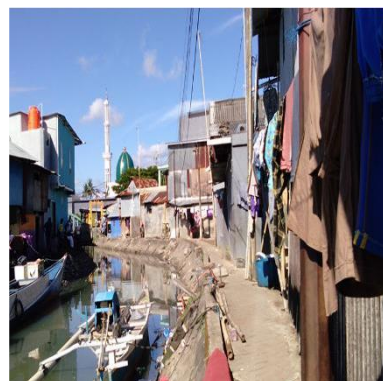
**Kelurahan Tanjung Merdeka** merupakan wilayah pesisir yang berkembang dengan tantangan utama pada aspek penataan permukiman dan pengelolaan lingkungan. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari Dasawisma PKK Kota Makassar, Kelurahan Tanjung Merdeka terdiri dari 8 RW dan 31 RT, jumlah penduduk 4.509 jiwa. Jumlah bangunan di wilayah ini tercatat sebanyak 1.378 unit, 1.341 rumah dalam kategori rumah sehat dan 37 rumah kategori kurang sehat.



*Gambar 2. 2 Kondisi Bangunan di Kelurahan Tanjung Merdeka*

Sebagian besar rumah di Kelurahan Tanjung Merdeka telah dibangun secara permanen dengan material tembok dan atap seng. Namun, terdapat beberapa unit bangunan semi permanen di area padat penduduk. Masih ditemukan ketidakteraturan dalam tata letak bangunan serta minimnya ruang terbuka antar rumah.

**Kelurahan Bontorannu** umum didominasi oleh kawasan padat yang terletak di dekat bantaran sungai atau wilayah dataran rendah. Berdasarkan hasil observasi lapangan dan data sekunder yang diperoleh dari Dasawisma PKK Kota Makassar, Kelurahan Bontorannu terdiri dari 5 RW dan 19 RT, jumlah penduduk 3.760 jiwa. Jumlah bangunan di wilayah ini tercatat sebanyak 886 unit, 769 rumah dalam kategori rumah sehat dan 96 rumah kategori kurang sehat. Banyak bangunan yang diamati merupakan rumah panggung dengan bahan utama kayu dan atap seng, sebagian dalam kondisi lapuk dan tidak terawat. Kepadatan bangunan cukup tinggi, dan tidak ada jarak yang memadai antar unit rumah.



*Gambar 2. 3 Kondisi Bangunan di Kelurahan Bontorannu*

b) Kondisi Jalan Lingkungan

Sebagian ruas jalan di **Kelurahan Tallo** telah mengalami peningkatan kondisi jalan berupa permukaan beton dan paving. Jalan cukup rata dan bersih, dengan lebar sekitar 3 meter, yang memungkinkan akses kendaraan roda dua dan roda empat. Namun demikian, meskipun jalan telah dibeton, aksesibilitas masih tergolong sempit, serta tidak tersedia trotoar di sisi jalan. Hal ini dapat menyulitkan pergerakan warga pejalan kaki, terutama saat hujan. Selain itu, beberapa penduduk yang tinggal dipinggir laut/pesisir akses jalan belum memadai. Keberadaan tiang listrik dan lampu penerangan jalan menunjukkan adanya fasilitas dasar, namun kabel listrik terlihat menggantung dan tidak tertata rapi, yang tentunya sangat berpotensi membahayakan keselamatan warga. Kondisi ini mencerminkan bahwa perbaikan jalan telah dilakukan secara parsial, namun belum disertai dengan penataan utilitas.



*Gambar 2. 4 Kondisi Jalan Lingkungan Kelurahan Tallo*

Kondisi jalan di **Kelurahan Tanjung Merdeka** sebagian besar telah menggunakan paving block atau rabat beton. Namun masih terdapat permukaan jalan yang berupa lapisan aspal kasar yang mulai rusak dan tanah berbatu, yang terlihat dari permukaan jalan yang tidak rata dan berdebu.



*Gambar 2. 5 Kondisi Jalan di Kelurahan Tanjung Merdeka*

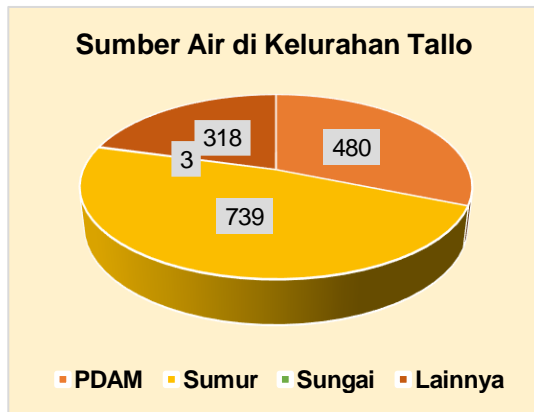
Kondisi jalan di lingkungan **Kelurahan Bontorannu** sebagian besar jalan sudah dalam kondisi cukup baik karena telah dilakukan perbaikan infrastruktur. Jalan lingkungan telah dilapisi dengan paving block, yang memberikan kesan tertata dan ramah pejalan kaki. Kondisi jalan relatif bersih dan rapi. Namun masih memerlukan peningkatan pemeliharaan paving block agar jalan tetap nyaman dan aman digunakan.



*Gambar 2. 6 Kondisi Jalan di Kelurahan Bontorannu*

c) Kondisi Penyediaan Air Minum

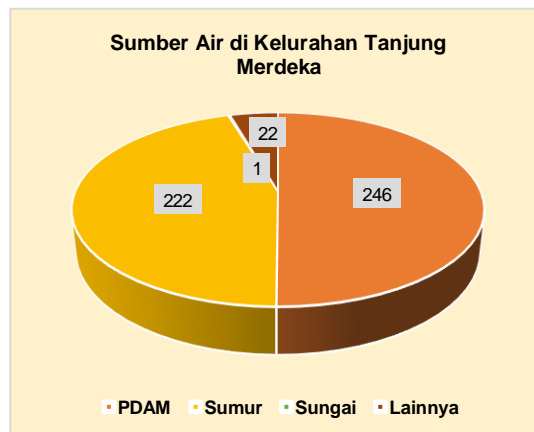
Masyarakat **Kelurahan Tallo** umumnya masih terbatas terhadap akses air bersih.



Gambar 2. 7 Sumber Air Masyarakat Kelurahan Tallo  
Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)

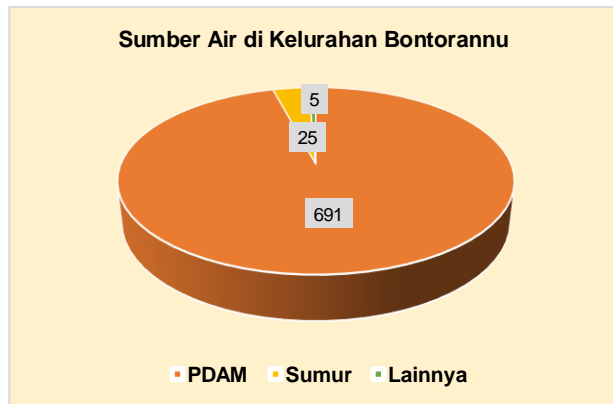
Sekitar 480 rumah menggunakan PDAM, 739 rumah menggunakan sumur, 3 rumah menggunakan air sungai, dan 318 rumah mengakses air bersih dari sumber lain. Jaringan air PDAM hanya menjangkau sebagian kecil rumah tangga, dan kualitas air sumur seringkali tidak layak konsumsi karena pencemaran dari limbah domestik. Sebagian besar masyarakat menggunakan air isi ulang galon untuk kebutuhan air minum.

Sebagian besar rumah di **Kelurahan Tanjung Merdeka** telah terhubung dengan jaringan PDAM yaitu sekitar 246 rumah, namun suplai air tidak selalu stabil dan kualitas air sering dikeluhkan warga karena keruh. Selain itu, 222 rumah menggunakan air sumur, 1 rumah menggunakan air sungai, dan 22 rumah menggunakan sumber lain. Warga juga menggunakan air galon isi ulang untuk kebutuhan konsumsi atau air minum.



Gambar 2. 8 Sumber Air Masyarakat Kelurahan Tanjung Merdeka  
Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)

Akses terhadap sumber air masyarakat di **Kelurahan Bontorannu** dominan menggunakan PDAM yaitu 691 rumah, 25 rumah menggunakan sumur dan 5 rumah menggunakan sumber lainnya. Sebagian besar masyarakat di permukiman kumuh mengandalkan air sumur dangkal sebagai sumber utama air minum. Air galon isi ulang digunakan hanya oleh sebagian warga karena alasan ekonomi.



*Gambar 2. 9 Sumber Air Masyarakat Kelurahan Bontorannu*  
*Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)*

Namun, warga di Kelurahan Bontorannu yang sebelumnya mengalami keterbatasan akses air minum kini telah mendapatkan sambungan rumah yang fungsional. Sambungan air minum tersebut tersalur langsung ke rumah-rumah warga, meningkatkan akses terhadap air bersih dan layak konsumsi.



*Gambar 2. 10 Sambungan Rumah*  
*di Kelurahan Bontorannu*

#### d) Kondisi Drainase Lingkungan

Saluran drainase di **Kelurahan Tallo** beberapa dalam kondisi tertutup, namun sebagian besar masih bersifat tidak teratur dan terbuka, tidak terawat, tersumbat oleh lumpur dan sampah. Ketika

hujan turun, genangan air kerap terjadi, terutama di wilayah dengan elevasi rendah. Keadaan ini memperbesar risiko penyebaran penyakit akibat genangan dan kelembaban tinggi.



*Gambar 2. 11 Kondisi Drainase Lingkungan Kelurahan Tallo*

Saluran drainase di **Kelurahan Tanjung Merdeka** belum optimal karena masih ada yang belum memiliki saluran drainase. Namun, di beberapa titik ditemukan saluran drainase tersedia tetapi dalam kondisi yang kurang baik, dan masih banyak yang mengalami penyumbatan karena tumpukan sampah rumah tangga.



*Gambar 2. 12 Kondisi Drainase Lingkungan Kelurahan Tanjung Merdeka*

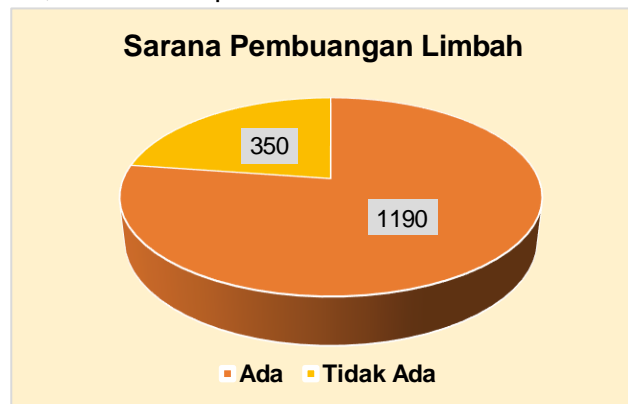
Kondisi drainase di **Kelurahan Bontorannu** yang telah dibangun kini membantu mengalirkan air hujan dan limbah domestik, mengurangi genangan dan potensi banjir. Namun, masih diperlukan pengembangan lanjutan karena baru sekitar 52,8% volume yang direalisasikan.



Gambar 2. 13 Kondisi Drainase Lingkungan di Kelurahan Bontorannu

e) Kondisi Pengelolaan Air Limbah

Kondisi pengelolaan air limbah di **Kelurahan Tallo** masih belum optimal, terutama di permukiman kumuh.



Gambar 2. 14 Sarana Pembuangan Limbah Kelurahan Tallo  
Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)

Berdasarkan data dari Dasawisma PKK Kota Makassar, jumlah total bangunan di Kelurahan Tallo sebanyak 1.565 unit. Dari jumlah tersebut, hanya 1.190 unit (sekitar 76%) yang memiliki sarana pembuangan limbah, sementara 350 unit (24%) tidak memiliki sarana tersebut. Persentase ini menunjukkan bahwa hampir seperempat dari total bangunan di wilayah ini belum dilengkapi dengan sistem pembuangan limbah yang layak. Ketiadaan fasilitas sanitasi ini menandakan lemahnya infrastruktur dasar di kawasan permukiman, khususnya di wilayah-wilayah yang tergolong kumuh.

Pengelolaan air limbah di **Kelurahan Tanjung Merdeka** masih belum baik. Hal ini dikarenakan Air limbah domestik dari dapur dan kamar mandi dibuang ke selokan terbuka tanpa pengolahan. Terdapat 465 rumah memiliki *septic tank* individual, namun belum ada sistem sanitasi komunal yang terintegrasi.



*Gambar 2. 15 Sarana Pembuangan Limbah  
Kelurahan Tanjung Merdeka  
Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)*

Masyarakat di **Kelurahan Bontorannu** kini telah memiliki akses terhadap sistem pengelolaan air limbah domestik melalui sambungan ke IPAL Komunal. Limbah dari aktivitas rumah tangga seperti mandi, mencuci, dan dapur dialirkan ke sistem IPAL, bukan lagi dibuang ke selokan atau tanah terbuka. Namun, dukungan kelurahan dan Dinas Lingkungan Hidup dalam pemantauan dan pendampingan teknis memiliki peranan penting dalam pengelolaan keberlanjutan IPAL.

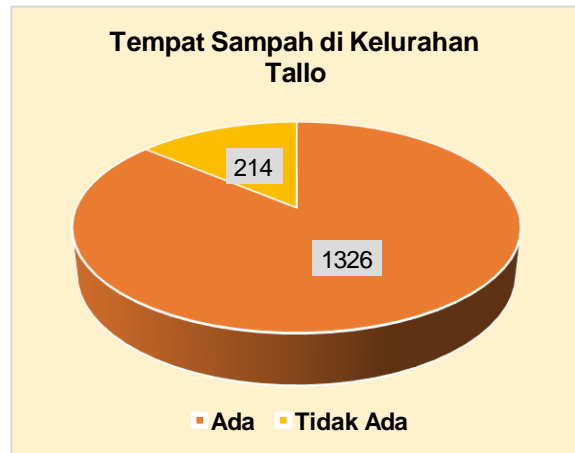


*Gambar 2. 16 Sarana Pembuangan Limbah  
di Kelurahan Bontorannu*

f) Kondisi Pengelolaan Persampahan

Sistem pengelolaan sampah di **Kelurahan Tallo** belum berjalan optimal. Meskipun persentase rumah tangga yang telah memiliki tempat sampah menunjukkan bahwa kesadaran individu terhadap pentingnya pengelolaan sampah di tingkat rumah tangga

sudah relatif tinggi. Namun, angka 13,90% atau 214 rumah yang belum memiliki tempat sampah tetap menjadi indikator adanya kerentanan terhadap praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai standar sanitasi.



Gambar 2. 17 Ketersediaan Tempat Sampah di Kelurahan Tallo  
Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)

Di sisi lain, ketersediaan Tempat Penampungan Sementara (TPS) yang tidak merata, serta sistem pengangkutan sampah yang belum menjangkau seluruh wilayah, menyebabkan penanganan sampah menjadi tidak terintegrasi. Hal ini memicu masyarakat untuk membuang sampah ke selokan, laut, lahan kosong, atau membakarnya, yang berpotensi menimbulkan dampak lingkungan.



Gambar 2. 18 Keberadaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Tallo

Pengelolaan sampah di **Kelurahan Tanjung Merdeka** dengan cara sampah dikumpulkan dalam karung atau ember, kemudian diangkut oleh petugas dari Dinas Kebersihan dengan

frekuensi dua sampai tiga kali seminggu. TPS resmi terbatas dan belum menjangkau semua RT. Di beberapa titik, sampah menumpuk dan mengganggu estetika serta kebersihan lingkungan.



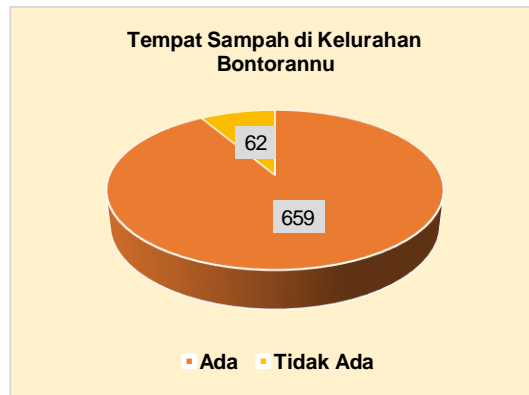
*Gambar 2. 19 Ketersediaan Tempat Sampah di Lingkungan Kelurahan Tanjung Merdeka*

*Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)*



*Gambar 2. 20 Keberadaan Sampah di Lingkungan Kelurahan Tanjung Merdeka*

Sebagian besar rumah tangga di **Kelurahan Bontorannu** telah memiliki tempat sampah individu di depan rumah masing-masing. Namun, Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi belum tersedia secara merata di setiap RW atau titik strategis. Layanan pengangkutan sampah oleh petugas atau armada dari Dinas Lingkungan Hidup belum menjangkau seluruh wilayah kelurahan. Masih terdapat praktik pembuangan sampah sembarangan, terutama di selokan, lahan kosong, atau bantaran kanal/sungai.



Gambar 2. 21 Ketersediaan Tempat Sampah di Lingkungan Kelurahan Bontorannu

Sumber: (Dasawisma PKK Kota Makassar)

g) Kondisi Proteksi Kebakaran

Sebagian besar wilayah di Kelurahan Tallo tidak dilengkapi dengan sarana pemadam kebakaran permanen, seperti hidran umum, jalur akses khusus mobil pemadam, atau alat pemadam api ringan (APAR) yang tersedia di lingkungan warga. Jarak antara permukiman padat dengan pos pemadam kebakaran juga cukup jauh, sehingga respon waktu apabila terjadi insiden kebakaran menjadi kurang efektif.

Masyarakat **Kelurahan Tanjung Merdeka** Warga tidak memiliki akses terhadap alat pemadam api ringan (APAR), dan kesadaran terhadap sistem penanggulangan kebakaran masih rendah. Kondisi ini juga sama dengan **Kelurahan Bontorannu** yang Tidak ada APAR, hidran, maupun jalur evakuasi yang memadai. Kondisi ini sangat berisiko, mengingat struktur bangunan yang mudah terbakar dan akses yang sempit.

2. Analisis DPSIR (*Driver-Pressure-State-Impact-Response*)

Setelah menguraikan kondisi eksisting penataan permukiman kumuh di Kelurahan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka, dan Kelurahan Bontorannu, tahap selanjutnya yaitu melakukan analisis menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Forces, Pressures, State, Impacts, Responses*). Melalui pendekatan ini, dapat diperoleh gambaran komprehensif yang mendukung perumusan strategi penataan permukiman kumuh secara holistik dan berkelanjutan.

Tabel 2. 1 Tabel Analisis DPSIR

Komponen (DPSIR)	Kel. Tallo	Kel. Tanjung Merdeka	Kel. Bontorannu
<b>Driver (Penggerak)</b>	Tingginya kepadatan penduduk dan pertumbuhan wilayah perkotaan menyebabkan tekanan terhadap infrastruktur dan fasilitas permukiman.	Adanya alih fungsi lahan pesisir dan peningkatan jumlah penduduk menambah beban pada infrastruktur dasar.	Pertumbuhan penduduk di kawasan padat mengakibatkan peningkatan kebutuhan akan infrastruktur dasar dan layanan lingkungan.
<b>Pressure (Tekanan)</b>	Kurangnya sistem drainase, tempat sampah sementara, dan pengelolaan limbah memicu pencemaran dan penurunan kualitas lingkungan.	Jalan lingkungan rusak, pembuangan air limbah langsung ke saluran terbuka, serta keterbatasan akses air bersih menambah tekanan lingkungan.	Terdapat tekanan terhadap sistem sanitasi, sampah dan jalan akibat kondisi lingkungan sebelumnya yang kumuh.
<b>State (Kondisi)</b>	Sebagian besar bangunan tidak layak, jalan sempit dan rusak, drainase tersumbat, pengelolaan limbah dan proteksi kebakaran belum optimal.	Bangunan dan sarana dasar masih belum memadai, akses terhadap air minum dan saluran pembuangan terbatas.	Setelah perbaikan, kondisi bangunan, jalan, drainase, serta sistem air limbah dan air bersih menunjukkan peningkatan signifikan.
<b>Impact (Dampak)</b>	Munculnya genangan, pencemaran lingkungan, peningkatan risiko penyakit	Potensi penyebaran penyakit, pencemaran lingkungan, dan rendahnya kualitas hidup masyarakat.	Kualitas lingkungan mulai membaik, namun tetap perlu pemeliharaan agar tidak kembali kumuh.

Komponen (DPSIR)	Kel. Tallo	Kel. Tanjung Merdeka	Kel. Bontorannu
	dan kebakaran akibat kondisi lingkungan yang buruk.		
<b>Response (Tanggapan)</b>	Perlu adanya peningkatan infrastruktur dasar seperti air minum, drainase, dan TPS serta edukasi masyarakat mengenai pengelolaan lingkungan.	Diperlukan intervensi dalam bentuk rehabilitasi infrastruktur, sistem pengelolaan air limbah, dan penyuluhan kesehatan masyarakat.	Sudah dilakukan intervensi seperti pembangunan IPAL, perbaikan jalan dan penyediaan sarana air bersih, meski penguatan kelembagaan masih dibutuhkan.

*Sumber: Analisis, 2025*

Berdasarkan analisis DPSIR, ketiga kelurahan menunjukkan tantangan yang berbeda terkait tekanan lingkungan dan respon yang diperlukan. Kelurahan Tallo menghadapi masalah kepadatan penduduk tinggi, sistem drainase yang buruk, dan pengelolaan limbah yang kurang, menyebabkan pencemaran dan risiko kesehatan, sehingga perlu peningkatan infrastruktur dasar dan edukasi masyarakat. Kelurahan Tanjung Merdeka mengalami tekanan akibat alih fungsi lahan dan infrastruktur yang rusak, dengan kondisi bangunan dan sarana dasar yang belum memadai, sehingga membutuhkan rehabilitasi infrastruktur dan penyuluhan kesehatan. Sementara itu, Kelurahan Bontorannu sudah mengalami perbaikan signifikan pada sistem sanitasi dan infrastruktur, namun pemeliharaan berkelanjutan masih diperlukan untuk mencegah kekumuhan kembali.

## **b. Pembahasan**

Indikator permukiman kumuh telah diatur secara resmi dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh. Regulasi tersebut mendefinisikan permukiman kumuh sebagai kawasan hunian yang tidak memenuhi standar kelayakan akibat susunan bangunan yang tidak teratur, tingkat kepadatan bangunan yang berlebihan, serta rendahnya mutu bangunan dan ketersediaan sarana maupun prasarana pendukung. Penilaian terhadap tingkat kekumuhan dilakukan dengan mempertimbangkan beberapa aspek utama, meliputi kondisi bangunan gedung, kualitas jalan lingkungan, ketersediaan air minum, sistem drainase lingkungan, pengelolaan air limbah, pengelolaan persampahan, serta upaya proteksi kebakaran (Arjihen, 2023).

### **1. Bangunan Gedung**

Kondisi bangunan pada kawasan permukiman kumuh dapat dianalisis melalui tingkat kepadatan bangunan yang dinyatakan dalam bentuk persentase. Kepadatan bangunan menunjukkan jumlah unit bangunan yang berada dalam satuan luas tertentu (Erlangga et al., 2023). Penelitian yang dilakukan oleh Ardi & Rahmawati, (2018) mengenai standar kepadatan bangunan berdasarkan jumlah unit per hektare menunjukkan bahwa permukiman nelayan Kedungcowek memiliki tingkat kepadatan mencapai 155 unit per hektare. Temuan tersebut mengindikasikan bahwa kawasan permukiman tersebut termasuk dalam kategori berkepadatan tinggi.

Kondisi eksisting bangunan gedung di wilayah Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu memperlihatkan karakteristik permukiman yang mencerminkan tantangan dalam perencanaan kota, khususnya di kawasan pesisir dan padat penduduk. Berdasarkan hasil observasi, sebagian besar bangunan di ketiga wilayah memiliki kepadatan yang tinggi dengan kualitas fisik bangunan yang bervariasi. Hal ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam penyediaan ruang layak huni serta ketidakteraturan tata ruang, yang sejalan dengan temuan UN-Habitat, (2020) bahwa kawasan kumuh umumnya ditandai oleh kepadatan tinggi, bangunan semi permanen, serta minimnya ruang terbuka dan infrastruktur dasar.

Di Kelurahan Tallo dan Bontorannu, dominasi bangunan semi permanen yang dibangun dari material campuran seperti kayu, seng, dan batu bata mengindikasikan rendahnya daya tahan bangunan terhadap bencana serta tidak terpenuhinya standar hunian sehat. Kondisi ini diperparah oleh buruknya ventilasi dan kerusakan fisik rumah, yang dapat berdampak terhadap kesehatan penghuninya (Bappenas, 2021). Sebaliknya, Kelurahan Tanjung Merdeka menunjukkan kondisi yang relatif lebih baik, dengan mayoritas bangunan permanen dan tingkat rumah sehat yang tinggi. Namun, penataan bangunan yang tidak beraturan dan kurangnya ruang terbuka tetap menjadi isu penting dalam upaya menciptakan lingkungan permukiman yang berkelanjutan (Kementerian PUPR, 2022c).

Kepadatan yang tinggi di ketiga kelurahan tersebut juga menjadi tantangan utama dalam peningkatan kualitas permukiman. Studi oleh Ward, et al. (2019) menyebutkan bahwa kepadatan tanpa perencanaan yang baik dapat memperburuk akses terhadap layanan dasar dan meningkatkan risiko bencana lingkungan. Dengan demikian, dibutuhkan upaya penanganan yang didukung oleh kebijakan yang tepat serta pendekatan partisipatif berbasis masyarakat guna mewujudkan penataan permukiman yang memenuhi prinsip kelayakan huni, inklusivitas, dan keberlanjutan. Pendekatan ini selaras dengan arah kebijakan Program Kota Tanpa Kumuh (KOTAKU) yang digagas oleh Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

Selanjutnya, temuan penelitian ini mengungkap adanya tantangan signifikan dalam pengelolaan kawasan dengan tingkat kepadatan bangunan yang tinggi pada lahan permukiman yang relatif terbatas. Kepadatan yang berlebihan tidak hanya menghambat sirkulasi udara dan pencahayaan alami, tetapi juga berdampak pada kualitas hidup masyarakat, termasuk risiko kesehatan dan kerentanan terhadap bencana. Dalam kondisi seperti ini, perencanaan tata ruang yang komprehensif dan berbasis data menjadi sangat penting untuk menciptakan distribusi bangunan yang lebih merata dan berkelanjutan. Selain itu, diperlukan peningkatan akses terhadap fasilitas umum seperti jalan lingkungan, drainase, ruang terbuka hijau, serta sarana kesehatan dan pendidikan. Tanpa intervensi perencanaan yang tepat, kepadatan yang tidak terkendali berpotensi memperparah kondisi lingkungan permukiman dan

memperlebar kesenjangan akses layanan dasar di tengah masyarakat.

## **2. Jalan Lingkungan**

Kondisi jalan lingkungan di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu menunjukkan adanya perbaikan infrastruktur secara bertahap, namun masih menghadapi berbagai tantangan teknis dan fungsional. Di Kelurahan Tallo, jalan-jalan lingkungan telah mengalami perkerasan dengan beton dan paving block, memberikan akses dasar bagi kendaraan. Namun, akses masih sempit dan tidak dilengkapi dengan trotoar, yang membatasi kenyamanan dan keselamatan pejalan kaki, terutama saat kondisi hujan. Selain itu, penataan utilitas seperti kabel listrik yang menggantung menunjukkan kurangnya integrasi antara pembangunan fisik dan penataan infrastruktur pendukung. Temuan ini sejalan dengan hasil kajian Kementerian PUPR, (2022) yang menegaskan bahwa pembangunan jalan lingkungan harus disertai dengan penataan utilitas secara terpadu guna menjamin aspek keselamatan sekaligus meningkatkan kualitas visual kawasan.

Di Kelurahan Tanjung Merdeka, sebagian besar jalan telah diperkeras, namun masih ditemukan jalan yang tidak rata dengan permukaan aspal kasar dan berbatu. Kondisi permukaan jalan tersebut berpotensi menimbulkan bahaya keselamatan serta menurunkan tingkat kenyamanan pergerakan masyarakat, terutama bagi kelompok rentan seperti lanjut usia dan anak-anak Bappenas, (2020). Sementara itu, kondisi jalan di Kelurahan Bontorannu terlihat lebih tertata, dengan penggunaan paving block secara merata dan kondisi jalan yang bersih. Meskipun demikian, kebutuhan akan pemeliharaan rutin menjadi penting untuk mencegah kerusakan dini pada infrastruktur jalan tersebut.

Secara umum, ketiga wilayah menunjukkan adanya inisiatif perbaikan, namun belum sepenuhnya menyelesaikan masalah aksesibilitas dan kenyamanan lingkungan. Diperlukan perencanaan terpadu yang mempertimbangkan aspek fungsi, estetika, dan keselamatan pengguna jalan dalam pengembangan infrastruktur kawasan permukiman kumuh. Partisipasi masyarakat secara aktif dalam proses perencanaan hingga pengawasan pembangunan menjadi faktor penting untuk memastikan bahwa kebijakan dan program yang dilaksanakan selaras dengan kebutuhan serta karakteristik lokal.

### 3. Penyediaan Air Minum

Kriteria kekumuhan pada aspek penyediaan air minum dinilai berdasarkan dua indikator utama, yaitu keterbatasan akses terhadap air minum yang aman dan tidak terpenuhinya kebutuhan air minum per kapita sesuai dengan standar yang ditetapkan (Asmitha, 2019). Akses air minum yang tidak aman ditandai oleh ketidakmampuan masyarakat memperoleh air yang memenuhi persyaratan kesehatan, seperti tidak berwarna, tidak berbau, dan tidak berasa. Sementara itu, ketidakcukupan kebutuhan air minum terjadi apabila konsumsi air masyarakat di kawasan perumahan atau permukiman berada di bawah batas minimum 60 liter per orang per hari.

Ketersediaan air minum di tiga kelurahan permukiman kumuh, yakni Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu, menunjukkan variasi yang signifikan namun masih menghadapi tantangan serupa, yaitu keterbatasan akses dan kualitas air. Di Kelurahan Tallo, hanya sekitar 30% rumah tangga yang menggunakan PDAM, sementara sebagian besar masih bergantung pada air sumur yang kualitasnya diragukan akibat pencemaran domestik. Warga di Tanjung Merdeka juga mengeluhkan kualitas air PDAM yang keruh dan tidak stabil, meskipun cakupan layanan lebih baik dibanding Tallo. Di sisi lain, Bontorannu menunjukkan perbaikan signifikan dengan sebagian besar rumah sudah terhubung ke jaringan PDAM, meskipun penggunaan sumur masih terjadi di kalangan masyarakat berpenghasilan rendah.

Sebagian besar masyarakat masih belum memperoleh akses yang optimal terhadap sistem pelayanan air minum yang tersedia. Kondisi ini menunjukkan pentingnya upaya berkelanjutan dalam memperluas dan meningkatkan kualitas infrastruktur air minum, disertai dengan strategi pengelolaan dan pemeliharaan yang efektif. Penguatan sistem tersebut diharapkan mampu meningkatkan cakupan layanan air minum secara merata di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu, sehingga penataan lingkungan permukiman dapat berjalan lebih maksimal dalam menunjang kesejahteraan serta kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.

Temuan ini sejalan dengan penelitian Ardi & Rahmawati, (2018) yang mengungkapkan bahwa meskipun kawasan permukiman nelayan Kedungcowek telah dilalui jaringan pipa PDAM, sebagian warga memilih untuk tidak memanfaatkan layanan tersebut karena keterbatasan kemampuan ekonomi. Untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari seperti mandi dan mencuci,

masyarakat lebih mengandalkan air sumur yang dinilai masih layak digunakan karena jernih, tidak berbau, dan tidak berasa. Kondisi tersebut menyebabkan masyarakat yang belum terhubung dengan PDAM merasa belum memiliki urgensi untuk beralih ke sumber air bersih perpipaan.

Situasi ini menggambarkan perlunya intervensi lebih lanjut dalam pengembangan infrastruktur air bersih, khususnya di kawasan kumuh yang padat dan rawan pencemaran. Menurut WHO & UNICEF, (2021) akses terhadap air minum yang aman dan andal merupakan hak dasar manusia dan menjadi indikator utama dalam penilaian sanitasi lingkungan yang sehat. Upaya integratif antara pemerintah daerah, penyedia layanan air, dan masyarakat diperlukan untuk menjamin distribusi air yang adil, berkelanjutan, dan layak konsumsi.

#### **4. Drainase Lingkungan**

Kondisi kekumuhan yang ditinjau dari aspek drainase lingkungan ditandai oleh sejumlah permasalahan, antara lain ketidakmampuan saluran dalam mengalirkan limpasan air secara efektif, ketiadaan jaringan drainase, tidak terintegrasinya saluran lingkungan dengan sistem drainase perkotaan, rendahnya tingkat pemeliharaan, serta mutu konstruksi drainase yang tidak memenuhi standar teknis (Asmitha, 2019). Berdasarkan hasil observasi kondisi drainase di tiga kelurahan yang diteliti menunjukkan tantangan serius dalam pengelolaan air limpasan dan limbah domestik. Di Kelurahan Tallo, sebagian besar saluran drainase masih terbuka, tidak tertata, serta dipenuhi lumpur dan sampah, yang menyebabkan seringnya genangan saat hujan, terutama di area rendah. Kondisi ini meningkatkan risiko penyakit akibat lingkungan yang lembap dan tercemar (Kemenkes RI, 2020).

Sementara itu, di Kelurahan Tanjung Merdeka, keberadaan saluran drainase belum merata, dan banyak yang mengalami penyumbatan akibat sampah rumah tangga. Saluran yang ada pun belum sepenuhnya berfungsi optimal, sehingga berpotensi memicu banjir lokal dan memperburuk kualitas lingkungan permukiman. Berbeda dengan dua wilayah sebelumnya, Kelurahan Bontorannu menunjukkan kemajuan dalam sistem drainase. Saluran yang telah dibangun mampu mengurangi genangan air, namun capaian realisasi pembangunan drainase baru sekitar 52,8%, sehingga pengembangan lanjutan masih diperlukan. Secara keseluruhan,

keberadaan drainase yang tidak memadai dan tidak terawat berisiko tinggi terhadap kesehatan lingkungan dan kenyamanan hunian. Oleh karena itu, pembangunan dan pemeliharaan sistem drainase yang terencana dan berbasis masyarakat menjadi hal penting dalam strategi pengurangan risiko kawasan kumuh (UN-Habitat, 2020).

Berdasarkan laporan akhir RP2KPKPK (2024), permasalahan drainase di Kota Makassar dipengaruhi oleh pesatnya pembangunan kawasan terbangun yang menutup area resapan air, seperti rawa-rawa, serta lemahnya penerapan perencanaan sistem drainase yang terintegrasi. Kondisi tersebut menyebabkan aliran air hujan tidak dapat mengalir secara optimal sehingga memicu terjadinya genangan hingga banjir. Selain itu, kinerja drainase juga terganggu oleh penyumbatan saluran akibat penumpukan sampah, sedimentasi pasir yang dipicu oleh desain saluran yang kurang tepat, serta terputusnya jaringan drainase karena tidak dilengkapi bangunan pelimpasan seperti gorong-gorong.

## **5. Pengelolaan Air Limbah**

Kekumuhan dari aspek pengelolaan air limbah ditentukan oleh dua indikator utama, yaitu ketidaksesuaian sistem pengelolaan air limbah dengan standar teknis serta tidak terpenuhinya persyaratan teknis pada sarana dan prasarana pengelolaan air limbah (Asmitha, 2019). Kondisi pengelolaan air limbah di kawasan permukiman kumuh Kota Makassar menunjukkan adanya ketimpangan antarwilayah. Di Kelurahan Tallo, sekitar 24% bangunan belum dilengkapi fasilitas pembuangan air limbah, yang mencerminkan keterbatasan infrastruktur sanitasi dasar dan tingginya potensi pencemaran lingkungan. Ketiadaan fasilitas sanitasi yang layak menjadi indikator kuat rendahnya kualitas permukiman dan berimplikasi pada meningkatnya risiko penyakit berbasis air, seperti diare dan infeksi kulit (Kemenkes RI, 2020). Penelitian sejalan yang dilakukan oleh Wiharti, (2021) yang menunjukkan bahwa seluruh masyarakat di Desa Simpang Warga Dalam dan Desa Muara Halayung belum memiliki sistem pengelolaan air limbah yang memenuhi standar kelayakan.

Di Kelurahan Tanjung Merdeka, meskipun sebagian besar rumah memiliki septic tank individual, sistem pengelolaan masih bersifat parsial dan tidak terintegrasi. Air limbah domestik masih banyak dibuang ke saluran terbuka, yang memperburuk kondisi sanitasi lingkungan dan meningkatkan beban pencemaran perairan lokal. Ketidakhadiran sistem pengolahan limbah komunal

menandakan kurangnya perencanaan sanitasi berbasis kawasan yang terstruktur (Kementerian PUPR, 2022b).

Sebaliknya, Kelurahan Bontorannu menunjukkan perkembangan positif melalui penerapan IPAL komunal sebagai upaya pengelolaan air limbah di kawasan dengan kepadatan penduduk tinggi. Sistem ini dapat dipandang sebagai praktik baik dalam peningkatan kualitas sanitasi permukiman. Namun demikian, keberlanjutan operasionalnya sangat ditentukan oleh keterlibatan aktif pemerintah kelurahan dan instansi teknis terkait, khususnya dalam aspek pemantauan dan pembinaan kepada masyarakat. Salah satu alternatif untuk memperluas akses sanitasi layak adalah pembangunan IPAL komunal pada kawasan permukiman yang belum memiliki sistem pengolahan limbah domestik secara mandiri (Wulandari & Soeprbowati, 2024).

Di sisi lain, pemisahan antara saluran pembuangan air limbah rumah tangga dan sistem drainase lingkungan belum sepenuhnya terwujud di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, maupun Bontorannu. Kondisi ini mengindikasikan perlunya peningkatan kualitas dan kelengkapan infrastruktur sanitasi agar pengelolaan limbah dapat berjalan lebih efektif serta mengurangi dampak pencemaran lingkungan. Dengan perbaikan sistem sanitasi yang terintegrasi, upaya peningkatan derajat kesehatan masyarakat dan keberlanjutan lingkungan dapat lebih optimal. Secara umum, keberhasilan pengelolaan limbah domestik di kawasan permukiman kumuh tidak hanya ditentukan oleh ketersediaan sarana fisik, tetapi juga dipengaruhi oleh dukungan kelembagaan, tingkat literasi sanitasi masyarakat, serta sistem pengawasan lingkungan yang berkelanjutan (Amanda CP & Firra, R, 2023).

## **6. Pengelolaan Persampahan**

Kekumuhan dari aspek pengelolaan persampahan ditentukan oleh tiga indikator utama, yaitu ketidaksesuaian sarana dan prasarana persampahan dengan standar teknis, sistem pengelolaan sampah yang tidak memenuhi ketentuan teknis, serta rendahnya tingkat pemeliharaan fasilitas persampahan yang tersedia (Kementerian PUPR, 2022a). Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengelolaan persampahan di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu belum berfungsi secara optimal dan berkelanjutan. Di Kelurahan Tallo, meskipun sebagian besar rumah tangga telah memiliki tempat sampah, masih terdapat sekitar 13,90% atau 214 rumah yang belum dilengkapi fasilitas tersebut. Kondisi ini berpotensi

mendorong praktik pembuangan sampah yang tidak sesuai dengan standar sanitasi, seperti ke saluran air, lahan kosong, maupun wilayah pesisir.

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat, (2021) yang mengungkapkan bahwa pengelolaan sampah di kawasan kumuh Kelurahan Sri Meranti masih dilakukan secara individual, antara lain dengan cara dibakar atau dibuang ke area terbuka, drainase, dan sungai. Selain itu, kawasan tersebut belum didukung oleh infrastruktur persampahan yang memadai, seperti tempat sampah komunal, fasilitas pengomposan, alat pengumpul sampah, maupun kontainer penampungan sementara. Keterbatasan sarana dan prasarana tersebut menunjukkan bahwa lemahnya sistem persampahan turut memperburuk kualitas lingkungan permukiman serta meningkatkan risiko gangguan kesehatan bagi masyarakat.

Hal serupa juga terjadi di Kelurahan Tanjung Merdeka dan Bontorannu, di mana sebagian besar rumah tangga telah memiliki tempat sampah, tetapi sistem penampungan dan pengangkutan belum merata. Ketidakterpenuhinya Tempat Penampungan Sementara (TPS) resmi di setiap RW dan kurangnya armada pengangkutan dari Dinas Lingkungan Hidup menyebabkan timbulnya penumpukan sampah di beberapa titik lingkungan, yang tidak hanya mengganggu estetika tetapi juga mengancam kesehatan masyarakat dan kualitas lingkungan sekitar (Prihantoro et al., 2025).

Selain itu, frekuensi pengangkutan sampah yang terbatas yakni hanya dua hingga tiga kali dalam seminggu di Tanjung Merdeka menambah kompleksitas masalah ini. Kondisi ini berpotensi memperparah pencemaran lingkungan apabila tidak segera ditangani dengan pendekatan yang holistik dan partisipatif. Menurut Ramadhani et al., (2020), pengelolaan sampah di tingkat permukiman harus melibatkan tiga elemen utama, yaitu: ketersediaan infrastruktur dasar (tempat sampah dan TPS), sistem pelayanan pengangkutan yang menjangkau seluruh wilayah, dan perubahan perilaku masyarakat dalam membuang dan memilah sampah. Tanpa sinergi antara ketiganya, sistem pengelolaan sampah akan terus mengalami hambatan yang bersifat sistemik.

Ketidakterpaduan antara kesadaran masyarakat, fasilitas, dan pelayanan menjadi tantangan besar bagi pengelolaan lingkungan di wilayah-wilayah ini. Kondisi ini menunjukkan perlunya peningkatan akses terhadap sarana prasarana pengelolaan sampah yang merata serta perbaikan sistem pengangkutan yang efektif. Selain itu,

intervensi berbasis edukasi lingkungan dan pelibatan masyarakat lokal juga menjadi kunci dalam mengubah pola perilaku terhadap sampah rumah tangga (Widnyana et al., 2025). Dalam konteks kawasan pesisir dan permukiman kumuh, pendekatan berbasis komunitas sangat penting untuk memperkuat ketahanan lingkungan dan menciptakan wilayah yang bersih, sehat, dan layak huni secara berkelanjutan.

## **7. Proteksi Kebakaran**

Penilaian tingkat kekumuhan dilakukan dengan menggunakan indikator perlindungan terhadap kebakaran, yang mencakup ketersediaan prasarana serta sarana proteksi kebakaran. Suatu kawasan dinilai memiliki tingkat kekumuhan apabila fasilitas pendukung untuk pencegahan dan penanggulangan kebakaran belum tersedia secara memadai (Kementerian PUPR, 2022a). Berdasarkan hasil kajian, kondisi proteksi kebakaran di ketiga kelurahan, yakni Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu, menunjukkan kerentanan yang cukup tinggi terhadap bahaya kebakaran. Di Kelurahan Tallo, ketiadaan sarana proteksi permanen seperti hidran umum, jalur akses untuk mobil pemadam, maupun keberadaan APAR di lingkungan warga, menjadi kendala utama dalam penanganan dini kebakaran. Jarak yang jauh antara permukiman padat dengan pos pemadam kebakaran memperburuk situasi, karena memperlambat respon waktu ketika terjadi insiden (Fitri et al., 2022).

Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Hidayat, (2021) pada kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sri Meranti, yang menunjukkan bahwa infrastruktur proteksi kebakaran belum memenuhi standar yang ditetapkan. Kondisi tersebut disebabkan oleh keterbatasan sumber air untuk pemadaman serta jaringan jalan lingkungan yang tidak dapat dilalui kendaraan pemadam kebakaran. Selain itu, hidran kebakaran belum tersedia di setiap kawasan dengan mempertimbangkan tingkat kepadatan bangunan dan kemudahan akses mobil pemadam. Penelitian lain oleh Wiharti, (2021) di Desa Simpang Warga Dalam dan Desa Muara Halayung juga menemukan bahwa seluruh kawasan permukiman belum memiliki prasarana maupun sarana perlindungan kebakaran yang memadai.

Kondisi ini sangat berisiko, terlebih karena struktur bangunan di kawasan kumuh umumnya terbuat dari material yang mudah terbakar dan didirikan dalam jarak yang sangat rapat, sehingga

potensi penyebaran api secara cepat sangat besar (Sulistyaningtyas et al., 2024). Akses jalan lingkungan yang sempit juga menyulitkan petugas pemadam untuk menjangkau lokasi kebakaran dengan cepat. Oleh karena itu, diperlukan intervensi segera dalam bentuk penyediaan sarana proteksi kebakaran, pelatihan tanggap darurat kepada masyarakat, serta penguatan regulasi tata ruang dan keselamatan bangunan di kawasan kumuh (Anwar & Lukas, 2019).

Tahap berikutnya dilakukan analisis dengan menggunakan pendekatan DPSIR. Kerangka DPSIR (*Driver–Pressure–State–Impact–Response*) merupakan metode yang efektif untuk mengkaji berbagai persoalan lingkungan, termasuk isu permukiman kumuh (Liu et al., 2020). Melalui pendekatan ini, permasalahan permukiman dipahami sebagai suatu sistem yang saling terhubung, mencakup aspek sosial ekonomi, kebijakan pemerintah, kondisi lingkungan, serta pola perilaku masyarakat (Rahmat et al., 2025).

Hasil analisis menggunakan pendekatan DPSIR (*Driving Forces, Pressures, State, Impact, Responses*) menunjukkan bahwa ketiga kelurahan yang diteliti memiliki karakteristik dan tantangan yang berbeda dalam hal kondisi eksisting permukiman kumuh serta respons penanganannya. Di Kelurahan Tallo, faktor pendorong utama berupa tingginya kepadatan penduduk memberi tekanan besar terhadap sistem lingkungan, terutama dalam aspek drainase dan pengelolaan limbah. Ketidakmampuan sistem infrastruktur untuk mengakomodasi jumlah penduduk yang terus meningkat menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan dan meningkatnya risiko kesehatan masyarakat. Hal ini menunjukkan bahwa kondisi *state* di wilayah ini telah mengalami degradasi signifikan. Dampaknya tidak hanya berupa penurunan kualitas lingkungan fisik, tetapi juga munculnya masalah sosial seperti meningkatnya angka penyakit berbasis lingkungan (WHO, 2018). Mengacu pada Permen PUPR Nomor 14 Tahun 2018, bentuk respons yang perlu dilakukan meliputi peningkatan mutu serta jangkauan infrastruktur dasar, terutama pada sistem drainase dan pengelolaan limbah. Selain itu, diperlukan program edukasi bagi masyarakat guna menumbuhkan kesadaran dan mendorong partisipasi aktif dalam menjaga kualitas lingkungan (Kementerian PUPR, 2018).

Berbeda dengan Tallo, Kelurahan Tanjung Merdeka lebih dipengaruhi oleh tekanan dari alih fungsi lahan yang tidak terkendali serta rusaknya infrastruktur permukiman. Perubahan penggunaan lahan yang tidak diimbangi dengan perencanaan matang

menyebabkan terganggunya fungsi kawasan permukiman (Bappenas, 2020). Kondisi bangunan dan sarana dasar yang belum memadai memperburuk *state* lingkungan setempat, menjadikannya rentan terhadap kerusakan fisik dan penurunan kualitas hidup. Dampaknya mencakup menurunnya kenyamanan tinggal, meningkatnya risiko kebakaran, dan lemahnya akses terhadap layanan dasar. Oleh karena itu, respons kebijakan di wilayah ini perlu difokuskan pada rehabilitasi dan pembangunan kembali infrastruktur dasar, disertai dengan penyuluhan kesehatan lingkungan kepada warga (Report, 2020).

Sementara itu, Kelurahan Bontorannu menunjukkan dinamika yang lebih positif. Meskipun sebelumnya masuk kategori kawasan kumuh, perbaikan sistem sanitasi dan infrastruktur yang telah dilakukan menunjukkan hasil yang signifikan. *State* lingkungan di wilayah ini telah mengalami perbaikan, ditandai dengan peningkatan kualitas sarana dasar dan berkurangnya tekanan lingkungan. Namun demikian, tantangan ke depan adalah menjaga keberlanjutan dari perbaikan yang telah dicapai. Ketidakteraturan dalam pemeliharaan infrastruktur dapat menyebabkan kemunduran kondisi lingkungan dan kembalinya kekumuhan (Dyah Nawang Wulan & Widodo, 2020). Oleh karena itu, respons yang dibutuhkan di Bontorannu tidak lagi bersifat korektif, melainkan preventif dan berkelanjutan, melalui sistem pemeliharaan rutin, pelibatan masyarakat dalam perawatan lingkungan, serta penguatan kelembagaan lokal (Cindy Prastika & Wiradendi Wolor, 2023).

Secara keseluruhan, temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan penanganan kawasan kumuh yang *tailored* (disesuaikan) dengan karakteristik lokal. Masing-masing kelurahan membutuhkan strategi yang berbeda, baik dari sisi prioritas infrastruktur maupun intervensi sosial. Pendekatan DPSIR terbukti membantu mengidentifikasi jalur kausal antara tekanan dan dampak lingkungan, sekaligus merumuskan respons yang lebih terarah dan kontekstual.

Penelitian Rahmat et al., (2025) menyatakan bahwa kawasan permukiman kumuh di Kelurahan Sandubaya, Kota Mataram, merupakan persoalan multidimensional yang dipengaruhi oleh aspek sosial, ekonomi, dan lingkungan. Analisis dengan pendekatan DPSIR menunjukkan bahwa faktor pendorong utamanya meliputi laju urbanisasi yang tinggi, pertumbuhan penduduk yang tidak diiringi penyediaan infrastruktur yang memadai, serta kondisi kemiskinan.

Tekanan yang timbul berupa penurunan kualitas infrastruktur, sanitasi yang kurang layak, dan sistem drainase yang tidak berfungsi optimal sehingga memperburuk kondisi kawasan. Dampak yang terjadi antara lain meningkatnya kerentanan terhadap bencana, gangguan kesehatan, serta terbatasnya peluang peningkatan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan upaya penanganan terpadu yang tidak hanya menitikberatkan pada pembangunan fisik, tetapi juga penguatan aspek sosial dan ekonomi secara berkelanjutan guna meningkatkan kualitas hidup dan meminimalkan risiko sosial serta lingkungan.

Kesimpulan dari Topik Penelitian I mengenai penataan permukiman kumuh adalah bahwa meskipun terdapat berbagai upaya pemerintah dalam memperbaiki infrastruktur dasar, tantangan utama tetap terletak pada lemahnya koordinasi antar-pemangku kepentingan dan belum optimalnya pengelolaan sarana serta prasarana. Temuan ini memperlihatkan bahwa penanganan permukiman kumuh tidak cukup hanya dengan intervensi fisik, tetapi juga membutuhkan tata kelola yang lebih terpadu. Hasil ini mendukung teori tentang penataan permukiman kumuh yang menekankan pentingnya integrasi perencanaan, kolaborasi multipihak, dan partisipasi masyarakat dalam mewujudkan lingkungan permukiman yang layak huni dan berkelanjutan.

## **2.7. Kesimpulan**

Penelitian ini menunjukkan bahwa kondisi eksisting permukiman kumuh di Kelurahan Tallo, Tanjung Merdeka, dan Bontorannu memiliki perbedaan signifikan dalam kualitas infrastruktur dasar, meskipun ketiganya tergolong sebagai wilayah kumuh di Kota Makassar.

1. Kelurahan Tallo menunjukkan kondisi yang paling memprihatinkan dengan tingkat kepadatan tinggi, drainase yang tidak berfungsi optimal, sistem pengelolaan limbah yang belum merata, dan minimnya proteksi kebakaran. Akses air bersih juga masih terbatas, dengan dominasi penggunaan sumur yang kualitasnya belum memenuhi standar kesehatan.
2. Kelurahan Tanjung Merdeka mengalami tekanan dari alih fungsi lahan dan belum optimalnya prasarana dasar seperti drainase, pengelolaan limbah, dan proteksi kebakaran. Namun, sebagian besar rumah telah permanen dan akses air bersih lebih baik dibanding Tallo.
3. Kelurahan Bontorannu telah mengalami perbaikan signifikan melalui pembangunan IPAL komunal, peningkatan jaringan air minum, serta

infrastruktur jalan dan drainase. Meskipun demikian, permasalahan seperti pengelolaan sampah dan kurangnya sarana proteksi kebakaran masih menjadi tantangan.

Melalui pendekatan DPSIR, terlihat bahwa setiap kelurahan memiliki faktor pendorong, tekanan, kondisi lingkungan, dampak, dan respons yang berbeda sehingga strategi penataan harus disesuaikan secara kontekstual.

## 2.8. Daftar Pustaka

- Amanda Cornelia Prastiwi, & Firra Rosariawari. (2023). Identifikasi dan Penentuan Strategi Pengelolaan Limbah Domestik Pada Kawasan Pesisir Dusun Kisik, Kabupaten Pasuruan. *INSOLOGI: Jurnal Sains Dan Teknologi*, 2(5), 947–957. <https://doi.org/10.55123/insologi.v2i5.2670>
- Anwar, Y., & Lukas. (2019). Kerentanan Kebakaran Permukiman Padat Di Kelurahan Sidodamai Kecamatan Samarinda Ilir Kota Samarinda. *Jurnal Azimut*, 2(2), 121. <https://doi.org/10.31317/jaz.v2i2.483>
- Ardi, A., & Rahmawati, D. (2018). Arahana Penataan Permukiman Kumuh Di Kelurahan Kedungcowek Surabaya Menggunakan Konsep Land Readjustment. *Jurnal Teknik ITS*, 7(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v7i2.33914>
- Arjihen, F. N. A. (2023). Implementasi Program Penataan Permukiman Kumuh Di Kampung Nelayan Tegalsari, Kota Tegal [Universitas Islam Sultan Agung]. [http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32751%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32751/2/31201900023\\_fullpdf.pdf](http://repository.unissula.ac.id/id/eprint/32751%0Ahttp://repository.unissula.ac.id/32751/2/31201900023_fullpdf.pdf)
- Asmitha, D. P. (2019). Strategi Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kota di Kecamatan Tembilahan Hulu. In Universitas Riau. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle>
- Bappenas. (2020). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu.
- Bappenas. (2021). Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020–2024.
- BPS. (2024). Statistik Daerah Kota Makassar 2024. In Badan Pusat Statistik Kota Makassar. <http://scioteca.caf.com/bitstream/handle/123456789/1091>
- Cindy Prastika, A., & Wiradendi Wolor, C. (2023). Analisis Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Kantor pada CV Kolaborasi Pemuda Cerdas. *Jurnal Administrasi Perkantoran Dan Kesekretariatan* |, 2(1), 94–103.
- Dasawisma PKK Kota Makassar. (n.d.). Profil Kelurahan Tallo. <https://dasawisma.pkk.makassarkota.go.id/rekap/kelurahan>

- Dewi, K. P., Kumurur, V. A., & Sela, R. L. E. (2019). Penentuan Kualitas Permukiman Berdasarkan Kriteria Eco-Settlement di Kelurahan Sindulang Kota Manado. *Jurnal Spasial*, 6(1), 169–177.
- Dyah Nawang Wulan, N., & Widodo, A. prasetyo. (2020). Strategi Pembangunan Dan Pengembangan Permukiman Dalam Penanganan Permukiman Kumuh Di Jawa Timur. *Jurnal Administrasi Politik Dan Sosial*, 1(2), 84–98. <https://doi.org/10.46730/japs.v1i2.24>
- Erlangga, R., Dimas Badarus Puspotruno, R. M., Najwaan Fawwaz, P., & Reza, M. (2023). Strategi Penanganan Slum Area Dengan Menggunakan Metode Ahp Berbasis Sig. *Prosiding SEMSINA*, 4(2), 19–28. <https://doi.org/10.36040/semsina.v4i2.8088>
- Fadjarani, S., & Ruli As'ari. (2018). Penataan Permukiman Kumuh Berbasis Lingkungan. *Jurnal Geografi*, 15(1), 56–67. <https://journal.unnes.ac.id/nju/index.php/JG/index>
- Fitri, A., Musri, & Syahrial, I. (2022). Implementasi Standar Pelayanan Minimal (SPM) Penanggulangan. *Jurnal Ilmiah Ekotrans & Erudisi*, 2(1), 55.
- Hidayat, H. (2021). Studi penanganan kawasan permukiman kumuh di kelurahan sri meranti kota pekanbaru. <http://repository.uir.ac.id/id/eprint/9399>
- Joenso, R. C., & Sari, S. R. (2020). Klasifikasi Kekumuhan Dan Konsep Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus : Permukiman Lampu Satu, Merauke). *Jurnal Arsitektur ARCADE*, 4(2), 94. <https://doi.org/10.31848/arcade.v4i2.366>
- Kemenkes RI. (2020). Profil Kesehatan Lingkungan Indonesia.
- Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. (2018). Peraturan Menteri PUPR No. 14/PRT/M/2018 tentang Pencegahan dan Peningkatan Kualitas terhadap Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh.
- Kementerian PUPR. (2022a). Buku Saku Identifikasi dan Penilaian Lokasi Kumuh Kegiatan Kotaku. <https://ibmpkp.pu.go.id/>
- Kementerian PUPR. (2022b). Buku Saku Petunjuk Konstruksi Sanitasi 2022. In Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.
- Kementerian PUPR. (2022c). Strategi Penanganan Permukiman Kumuh Terpadu. Direktorat Jenderal Cipta Karya.
- Liu, S., Ding, P., Xue, B., Zhu, H., & Gao, J. (2020). Urban sustainability evaluation based on the dpsir dynamic model: A case study in Shaanxi Province, China. *Sustainability (Switzerland)*, 12(18). <https://doi.org/10.3390/SU12187460>

- Maharani, H., & Nurlaili, N. (2019). Tata Kelola Pemukiman Nelayan Di Wilayah Perkotaan Pesisir Utara Jakarta. *Buletin Ilmiah Marina Sosial Ekonomi Kelautan Dan Perikanan*, 4(1), 7. <https://doi.org/10.15578/marina.v4i1.2048>
- Marjuni, S. N., Syafri, S., & Rahman, R. (2021). Analisis Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kecamatan Tallo Kota Makassar. *Journal of Urban Planning Studies*, 1(2), 105–113. <https://doi.org/10.35965/jups.v1i2.22>
- Prihantoro, R. T., Gusmayanti, E., & Yani, A. (2025). Strategi Pengelolaan Sampah di Ibu Kota Kabupaten Sanggau. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 23(2), 516–523. <https://doi.org/10.14710/jil.23.2.516-523>
- Putri, D. K., & Idajati, H. (2021). Identifikasi Kondisi Eksisting Permukiman Kumuh Berdasarkan Konsep Liveable Settlement pada Desa Kedungrejo. *Jurnal Teknik ITS*, 10(2). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v10i2.65001>
- Putri, O. V. J., & Kurniawati, U. F. (2022). Penilaian Implementasi Konsep Eco Settlement pada Permukiman Kumuh di Wilayah Pesisir Kelurahan Sukolilo Baru Kota Surabaya. *Jurnal Teknik ITS*, 11(3). <https://doi.org/10.12962/j23373539.v11i3.98210>
- Rahmat, N. I., Luthfi, J., Adiansyah, J. S., & Johari, H. I. (2025). Analisis Permasalahan Permukiman Kumuh Di Kota Mataram Dengan Pendekatan DPSIR. *Jurnal Planoeearth*, 10(1), 33–40.
- Ramadhani, R., Aminuddin, K. M., Randini, P., & Jimmyanto, H. (2020). Identifikasi Sistem Pengangkutan Sampah Di Kecamatan Alang-Alang Lebar Kota Palembang. *TEKNIKA: Jurnal Teknik*, 7(1), 30. <https://doi.org/10.35449/teknika.v7i1.128>
- Report, W. C. (2020). Unpacking the Value of Sustainable Urbanization. <https://doi.org/10.18356/c41ab67e-en>
- RP2KPKPK. (2024). Laporan Akhir Penyusunan Rencana Pencegahan dan Peningkatan Kualitas Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Kota Makassar.
- Saharuddin. (2018). Efektivitas Penanganan Permukiman Kumuh Perkotaan (Studi Kasus: Permukiman Kumuh Kelurahan Tallo Kota Makassar). In Universitas Bosowa Makassar.
- Sulistyaningtyas, S. A., Nugraha, A. L., & Hadi, F. (2024). Analisis Risiko Bencana Kebakaran Permukiman Menggunakan Metode Analytical Hierarchy Process (Studi Kasus : Kecamatan Banyumanik Dan Tembalang, Kota Semarang). *Jurnal Goedesi Undip*, 3(1), 48–57.
- UN-Habitat. (2020). *World Cities Report 2020: The Value of Sustainable Urbanization*.

- Ward, P., Earle, A., & Zuniga-Teran, A. (2019). Urban Density and Informality: A Global Overview. *Journal of Urban Affairs*.
- WHO. (2018). Sanitation safety planning. In *Sanitation Safety Planning*.
- WHO & UNICEF. (2021). Progress on household drinking water, sanitation and hygiene 2000–2020: Five years into the SDGs.
- Widnyana, I. M. A., Azis, A., & Harianti, A. (2025). Pemilahan Sampah Rumah Tangga Di Lingkungan Perkotaan ( Studi Kasus Di Desa Sumerta Kelod. *Vastuwidya*, 8(1), 72–79.
- Wiharti, M. U. (2021). Analisis Perhitungan Tingkat Kekumuhan Permukiman di Kabupaten Banjar. *Jurnal Teknologi Berkelanjutan*, 10(02), 88–96. <https://doi.org/10.20527/jtb.v10i02.205>
- Wulandari, S. S., & Soeprobowati, T. R. (2024). Strategi Pengelolaan Limbah Domestik Berbasis Masyarakat pada IPAL Komunal Guyub Rukun di Kota Salatiga. *Jurnal Ilmu Lingkungan*, 22(6), 1466–1476. <https://doi.org/10.14710/jil.22.6.1466-14>

